

NOTA DINAS
NOMOR: 12 /IJ-IND.3/PR/II/2023

Yth : Inspektur Jenderal
Dari : Inspektur II
Hal : Penyampaian LAKIP Inspektorat II Tahun 2022
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Tanggal : 10 Februari 2023

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bersama ini terlampir kami sampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Inspektorat II Tahun 2022 yang menjelaskan pencapaian kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan sebelumnya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Inspektur II,


Janu Suryanto

Tembusan :

Sekretaris Inspektorat Jenderal.



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

INSPEKTORAT II

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSPEKTORAT II**

TAHUN 2022

**INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN**

JAKARTA, Februari 2022

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat II Tahun 2022 merupakan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban akuntabilitas terhadap kinerja sekaligus bahan evaluasi terhadap hasil yang telah dicapai selama 1 (satu) tahun anggaran.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat II disusun berdasarkan Pedoman Penyusunan LAKIP sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Diharapkan laporan ini dapat bermanfaat selain sebagai pertanggungjawaban atas Pelaksanaan tugas Inspektorat II selama tahun 2022, juga sebagai informasi dalam meneruskan dan meningkatkan pengawasan unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian di masa yang akan datang.

Pada kesempatan ini saya selaku Inspektur II mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pejabat dan pelaksana yang telah mendukung sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat II pada tahun 2022 dapat terlaksana dengan baik.

Jakarta, Februari 2023

INSPEKTUR II



Janu Suryanto

**IKHTISAR EKSEKUTIF
(EXECUTIVE SUMMARY)**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian yang mewajibkan setiap unit kerja sebagai unsur penyelenggara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Inspektorat II sebagai bagian unit kerja Inspektorat Jenderal dan sebagai unsur pembantu pimpinan di bidang pengawasan, memiliki kewajiban dalam mengamankan pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian Perindustrian. Berdasarkan Permenperin No. 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta penyusunan laporan pengawasan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, dan Unit Vertikal Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia Sidoarjo.

Realisasi anggaran TA 2022 sesuai Aplikasi PP39 mencapai Rp1.897.665.000,- Atau sebesar 98.58% dari total anggaran Rp1.925.000.000,- dengan realisasi capaian fisik sebesar 99.64%. Berdasarkan Aplikasi Sakti Realisasi Anggaran Tahun 2022 sebesar Rp Rp1.898.541.285,- atau 98.63%. Terdapat perbedaan realisasi anggaran pada Aplikasi PP39 dibandingkan dengan realisasi Aplikasi SAKTI dikarenakan ada SPTJB yang belum diinput Nomor atau Tanggal SP2D nya, dengan capaian kinerja sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja (IK)	Target	Realisasi	Ket
Perspektif Pemangku Kepentingan					
1	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Batas Toleransi Temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II *IKU	1,3%	0	Capaian 100%
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti pada Cakupan Tugas Inspektorat II	90%	100%	Capaian 111%
		Rekomendasi Hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat *IKU	92%	76.47%	Capaian 83%
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Koordinasi Penilaian Indeks Penerapan manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *IKU	Level 3	Level 2	Capaian 66.66%
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL					
3	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat II	80%	91.85%	Capaian 114,8 %
		Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	78%	89.14%	Capaian 114,3%

4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	Presentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Inspektorat II *IKU	80%	96.38%	Capaian 120.5%
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN					
4.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	90%	95.24%	Capaian 105.8%
		Tingkat Kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	100%	100%	Capaian 100%

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat II	1
B. Latar Belakang Kegiatan Program	1
C. Struktur Organisasi	3
D. Cakupan Tugas	4
BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	6
A. Rencana Strategis Organisasi	6
B. Rencana Kinerja Tahun 2022	10
C. Rencana Anggaran Tahun 2022	21
D. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022	23
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	28
A. Analisis Capaian Kinerja	28
B. Akuntabilitas Keuangan	65
C. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya	79
BAB IV : PENUTUP	82
Tinjauan Umum Keberhasilan dan Permasalahan/Kendala	82
A. Keberhasilan	82
B. Permasalahan / Kendala	82
C. Upaya dan Strategi Pemecahan	82

DAFTAR TABEL

1.	Indikator Kinerja Inspektorat II Berdasarkan Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2022 (Sebelum Perubahan)	12
2.	Indikator Kinerja Inspektorat II Berdasarkan Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2022 (Setelah Perubahan)	15
3.	Rencana Kinerja TA 2022	20
4.	Alokasi Anggaran Inspektorat II Tahun 2022	21
5.	Perjanjian Kinerja TA 2022	24
6.	Target dan capaian output Inspektorat II Tahun 2022	27
7.	Informasi Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Inspektorat II Tahun 2022	41
8.	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Inspektorat II Inspektorat Jenderal	51
9.	Realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis	61
10.	Capaian Realisasi Keuangan Inspektorat II Tahun 2022	66
11.	Perbandingan Realisasi Keuangan PP 39 dengan Aplikasi Sakti TA 2022	69
12.	Alokasi Dan Realisasi Anggaran Untuk Pencapaian Sasaran Kinerja Dengan Indikator Yang Telah Ditetapkan TA. 2022	69
13.	Realisasi Keuangan per Triwulan 2022 berdasarkan Data Aplikasi PP39	72
14.	Realisasi Keuangan per Triwulan 2021 berdasarkan Data Aplikasi PP39	73
15.	Realisasi Keuangan per Triwulan 2020 berdasarkan Data Aplikasi PP39	74
16.	Perbandingan Realisasi Keuangan Tahun 2022 dan 2021	76

DAFTAR GRAFIK

1.	Struktur Organisasi Inspektorat II	4
2.	Realisasi Tahun 2019-2022	31
3.	Target vs Realisasi Tahun 2019-2022	33
4.	Target vs Realisasi Tahun 2020-2022	36
5.	Target vs Realisasi Tahun 2019-2022	38

6.	Target vs Realisasi Tahun 2020-2022	40
7.	RPJMN 2020 - 2024	63
8.	Realisasi keuangan triwulanan tahun 2020-2022	75
9.	Realisasi keuangan perkegiatan tahun 2020-2022	77

LAMPIRAN

84

BAB I PENDAHULUAN

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT II

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka, dan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka.

Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
- Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- Pelaksanaan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha dan rumah tangga Inspektorat.
-

B. LATAR BELAKANG KEGIATAN/PROGRAM

Dalam rangka pencapaian tujuan dan fungsi tersebut, Inspektorat II telah menyusun program kegiatan tahun 2022 dengan didasarkan pada arah dan kebijakan program pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan Inspektorat Jenderal. Pada tahun 2022, Inspektorat II melakukan kegiatan guna pencapaian target dari sasaran strategis tahun 2022 dan menunjang program Inspektorat

Jenderal, melalui Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat II.

Pelaksanaan kegiatan/program dilatarbelakangi oleh kebijakan pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan Inspektorat II pada tahun 2022 adalah :

1. Optimalisasi peran pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan berbasis pada pembinaan, dimana Inspektorat Jenderal tidak hanya melaksanakan fungsi pemeriksaan, tetapi juga sebagai *Counseling Partner* (Mitra Kerja);
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengawasan yang cerdas dan profesional sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan;
3. Menyempurnakan sistem dan prosedur dalam pengawasan sebagai upaya mewujudkan ketaatan, ketertiban, efisiensi, efektivitas dan ekonomis dalam pelaksanaan tugas.

Sesuai dengan hal tersebut, Inspektorat II melaksanakan kegiatan **Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Unit Pusat dan Vertikal, Pengawasan Dekonsentrasi Perindustrian, dan Pengawasan Untuk Tujuan Tertentu/Audit Khusus** sesuai dengan cakupan tugas berdasarkan Peraturan Kementerian Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 sebagaimana telah disampaikan di atas.

Selain melakukan Pelaksanaan Pengawasan Kinerja, untuk menjaga kualitas laporan keuangan yang handal, transparan dan akuntabel, Inspektorat II juga melaksanakan kegiatan **Reviu Laporan Keuangan/BMN dan Reviu PIPK** di unit satker pusat dan vertikal yang menjadi cakupan tugasnya. Serta sebagai pengawas intern Kementerian/Lembaga, APIP juga memiliki tugas untuk memberikan keyakinan terbatas (*limited assurance*) terhadap perencanaan penganggaran sesuai dengan PMK Nomor 78 Tahun 2019. Oleh karena itu, pada tahun 2022 Inspektorat II juga mendapatkan amanah untuk melaksanakan kegiatan **Reviu RKAKL** terhadap seluruh unit kerja di bawah cakupan tugas Inspektorat II agar penerapan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran dilakukan sesuai kaidah peraturan yang berlaku. Dan kegiatan **Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara** sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara.

Sedangkan dalam rangka pemantauan pelaksanaan kegiatan terkait pengembangan Industri Nasional, Inspektorat II melaksanakan **monitoring dan evaluasi (Monev)** kegiatan yang terbagi menjadi Monitoring dan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II dan pada triwulan IV terdapat penambahan anggaran sebesar RP100.000.000,- yang dialokasikan pada kegiatan monitoring dan Evaluasi Pengawasan Penggunaan Produk Dalam Negeri. Dalam rangka untuk melakukan **pengawasan kegiatan prioritas Kementerian dan Nasional serta Pengawasan dan kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional** dalam bentuk konsultasi dan pengawasan pada Unit Eselon I Ditjen IKMA dan Ditjen ILMATE Inspektorat II melaksanakan Konsulting dan Pengawasan Program dan Kegiatan cakupan Tugas Inspektorat II. Dalam mendukung pelaksanaan seluruh kegiatan tersebut, Inspektorat II melaksanakan kegiatan **Layanan Manajemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Pengawasan, serta Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Pengawasan.**

C. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat II dipimpin oleh seorang Inspektur, adapun struktur organisasi Inspektorat II terdiri dari :

1. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, dan rumah tangga inspektorat.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Pada tahun 2021 ini, Inspektorat II memiliki total pegawai sebanyak 19 orang dengan rincian 1 (satu) orang Inspektur, 1 (satu) orang Kepala Subbagian

Tata Usaha, 16 (lima belas) orang Auditor (2 orang tugas belajar) dan 1 (satu) orang Analis evaluasi laporan.

Struktur organisasi Inspektorat II dapat dilihat sebagai berikut:



Grafik 1. Struktur Organisasi Inspektorat II

KOMPOSISI SDM INSPEKTORAT II:

NO	JABATAN	JUMLAH (ORANG)
1	Inspektur	1
2	Kasubag Tata Usaha	1
3	Auditor Madya	2
4	Auditor Muda	6
5	Auditor Pertama	8
3	Analisis Evaluasi Laporan	1
TOTAL		19

D. CAKUPAN TUGAS

Sesuai dengan Penetapan Cakupan Tugas Objek Pengawasan Unit Vertikal di Lingkungan Kementerian Perindustrian yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat II memiliki kewajiban melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta penyusunan laporan hasil pengawasan. Cakupan tugas Inspektorat II adalah sebagai berikut:

1. Unit Pusat, yaitu:

- a) Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka;
- b) Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka.

2. Unit Vertikal Balai, yaitu Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) Sidoarjo; dan

3. Dinas/Satker yang menangani Perindustrian di Provinsi (Dekonsentrasi) 34 Provinsi seluruh Indonesia, Yaitu:

- 1) Dinas Perindag Prov. Nagrae Aceh Darussalam
- 2) Dinas Perindag Prov. Sumatera Barat;
- 3) Dinas Perindag Prov. Bengkulu;
- 4) Dinas Perindag Prov. Sumatera Utara;
- 5) Dinas Perindag Prov. Riau;
- 6) Dinas Perindag Prov. Kepulauan Riau;
- 7) Dinas Perindag Prov. Jambi;
- 8) Dinas Perindag Prov. Sumatera Selatan
- 9) Dinas Perindag Prov. Bangka Belitung;
- 10) Dinas Perindag Prov. Lampung;
- 11) Dinas Perindag Prov. DKI Jakarta;
- 12) Dinas Perindag Prov. Banten;
- 13) Dinas Perindag Prov. Jawa Tengah;
- 14) Dinas Perindag Prov. DI. Yogyakarta;
- 15) Dinas Perindag Prov. Jawa Timur;
- 16) Dinas Perindag Prov. Jawa Barat;
- 17) Dinas Perindag Prov. Bali;
- 18) Dinas Perindag Prov. Nusa Tenggara Barat;
- 19) Dinas Perindag Prov. Nusa Tenggara Timur;
- 20) Dinas Perindag Prov. Kalimantan Utara;
- 21) Dinas Perindag Prov. Kalimantan Barat;
- 22) Dinas Perindag Prov. Kalimantan Tengah;
- 23) Dinas Perindag Prov. Kalimantan Selatan;
- 24) Dinas Perindag Prov. Kalimantan Timur;
- 25) Dinas Perindag Prov. Gorontalo;
- 26) Dinas Perindag Prov. Sulawesi Utara;
- 27) Dinas Perindag Prov. Sulawesi Barat;
- 28) Dinas Perindag Prov. Sulawesi Tengah;
- 29) Dinas Perindag Prov. Sulawesi Tenggara;
- 30) Dinas Perindag Prov. Sulawesi Selatan;
- 31) Dinas Perindag Prov. Maluku Utara;
- 32) Dinas Perindag Prov. Maluku;
- 33) Dinas Perindag Prov. Papua;
- 34) Dinas Perindag Prov. Papua Barat.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS ORGANISASI

Perencanaan strategis merupakan langkah awal dalam melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Untuk itu, perencanaan strategis yang disusun haruslah mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realistis dengan memperhatikan tugas dan fungsi.

Inspektorat II sebagai bagian dari unit kerja Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian telah menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran pengawasan Inspektorat Jenderal sebagai berikut :

1. Visi

Inspektorat Jenderal sebagai bagian Kementerian Perindustrian mempunyai visi yang sama dengan Kementerian Perindustrian dimana visi Kementerian Perindustrian ditetapkan sama dengan visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yaitu **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, Inspektorat Jenderal mengemban misi sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- f. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;

- g. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
- h. Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya;
- i. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

3. Tujuan Pengawasan

Tujuan dari pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Perindustrian selaras dengan Tujuan Kementerian Perindustrian, yaitu **“Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien untuk mendukung Peningkatan Peran Industri dalam Perekonomian Nasional”** yang bercirikan:

- a. Mampu memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- b. Mampu memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- c. Mampu memelihara dan meningkatkan kualitas tata Kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian.

4. Strategi pengawasan

Dalam mewujudkan tujuan pengawasan internal tersebut, diperlukan upaya-upaya sistematis yang dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran strategis yang mengakomodasi Perspektif Pemangku Kepentingan, Perspektif Proses Internal, dan Perspektif Pembelajaran Organisasi.

Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Inspektorat Jenderal untuk periode 2020-2024 juga merupakan turunan (cascading) dari sasaran strategis serta indikator kinerja Renstra Kementerian Perindustrian, yaitu tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien dengan indikator kinerja strategis sebagai berikut:

- a. Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal pada Cakupan Tugas Inspektorat II *) IKU;
- b. Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker Cakupan Tugas Inspektorat II*) IKU;
- c. Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU;
- d. Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat II *)IKU.

Untuk itu telah ditetapkan sasaran pengawasan yaitu meningkatnya kinerja semua unsur Kementerian dengan terlaksananya program pembangunan serta mencegah dan menekan hingga sekecil mungkin penyalahgunaan wewenang, kebocoran serta pemborosan keuangan negara.

Dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran-sasaran pengawasan intern Kementerian Perindustrian, telah disusun kebijakan pengawasan Kementerian Perindustrian dimana Inspektorat II merupakan bagian pelaksana kebijakan sebagai berikut:

1. Paradigma Pengawasan

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pengawasan, dilaksanakan Paradigma baru pengawasan, dimana secara bertahap kegiatan pengawasan akan didorong dari Post Audit (*watch dog*) menjadi pembinaan (*counseling partner*) dan ke depan menjadi Penjamin Mutu (*quality assurance*). Dengan paradigma baru tersebut ukuran keberhasilan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) bukan dari jumlah temuan, tetapi dari ukuran sejauh mana dapat membantu manajemen unit kerja mengatasi permasalahan yang timbul. Permasalahan tersebut meliputi aspek pengelolaan resiko, control, dan tata kelola yang baik yang pada akhirnya dapat membantu menangani resiko.

2. Nilai-nilai Pengawasan

Prinsip dan nilai-nilai penting yang diterapkan dalam pelaksanaan pengawasan adalah pengawasan yang transparan, obyektif, independen dan akuntabel. Nilai/prinsip tersebut menjiwai pelaksanaan pengawasan dan menjadi pedoman bagi pengaturan kode etik dan perilaku pengawas intern.

3. Peran Pengawasan

Fungsi dan Peran Pengawasan diarahkan untuk mencegah terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja serta menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan perundangan demi tercapainya sasaran/tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif.

4. Lingkup Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan menempatkan aparat pengawas sebagai mitra kerja auditi sehingga lingkup pengawasan dimulai dari tahap Perencanaan dan Penganggaran, Pelaksanaan kegiatan, sampai dengan Hasil yang diperoleh (*input, process, output, outcome, impact*), untuk memastikan bahwa :

- a. Petunjuk dan standar yang jelas dan faktor input yang ditetapkan telah tersedia;
- b. Segala proses dan perangkat penunjang berjalan sebagaimana mestinya; dan
- c. Output yang dihasilkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan

5. Kebijakan Pengawasan

- a. Melaksanakan pengawasan berbasis kinerja dengan mengedepankan aspek pembinaan kepada seluruh satker dalam rangka menjamin mutu kegiatan pemerintahan di bidang industri yang dilaksanakan oleh auditi.
- b. Menerapkan audit berbasis resiko.

6. Obyek Pengawasan

Objek pengawasan Inspektorat II Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian adalah Unit Kerja Kementerian Perindustrian baik di Pusat maupun di daerah, serta Provinsi penerima Dana Dekonsentrasi. Saat ini obyek pengawasan sebanyak 37 Unit kerja, terdiri dari: Unit Pusat 2 Unit, Unit Kerja Vertikal di daerah 1 Unit, Dinas Provinsi Penerima dana Dekonsentrasi sebanyak 34 Unit.

7. Fokus Pengawasan

Pengawasan intern yang dilakukan Inspektorat II Inspektorat Jenderal, berfokus pada 3 (tiga) aspek pengawasan Inspektorat Jenderal, yaitu:

- a. Pengawasan Program/Kegiatan, dengan melakukan audit kesesuaian pelaksanaan program dengan RPJM, Renstra, Tupoksi, Kebijakan dan Peraturan Perundangan yang berlaku dan sumber daya manusia serta sistem/prosedur kerja (SOP)
- b. Pengawasan Anggaran/Keuangan dan Barang Milik Negara, dengan mengaudit kesesuaian ketertiban pelaksanaan anggaran/keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, pengadaan barang dan jasa, analisis kebutuhan BMN, Pencatatan dan Inventarisasi BMN, Sistem pengamanan terhadap penyimpanan BMN, Prosedur Penghapusan BMN.
- c. Pengawasan Pelayanan Publik, dengan Monitoring dan audit penerapan *e-licensing*, Evaluasi penerapan sistem integritas pelayanan publik dan Monitoring penerapan praktek anti korupsi.

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka pada Tahun 2022 Inspektorat II memiliki program dan kegiatan melaksanakan **Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara Kementerian Perindustrian** sesuai dengan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian tahun 2020-2024, dan rencana kinerja Inspektorat Jenderal. Sasaran strategis Inspektorat II adalah sebagai berikut::

Perspektif Pemangku Kepentingan

1. Terwujudnya Efektifan dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian dengan indikator kinerja yaitu:
 - a. Batas Toleransi temuan material pengawasan eksternal pada cakupan tugas Inspektorat II*)IKU
 - b. Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti pada Cakupan Tugas Inspektorat II;

- c. Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat II*)IKU
2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dengan indikator kinerja yaitu Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU

Perspektif Proses Bisnis Internal

1. Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif dengan indikator kinerja yaitu:
 - a. Tingkat Kepuasan Pelanggan cakupan tugas Inspektorat II;
 - b. Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK).
2. Meningkatnya pemanfaatan industri barang dan jasa dalam negeri dengan indikator kinerja yaitu Persentase nilai capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat II *)IKU.

Perspektif Kelembagaan

1. Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien, dengan indikator kinerja yaitu:
 - a. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT; dan
 - b. Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya

Tabel 1. Indikator Kinerja Inspektorat II Berdasarkan Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2022 (Sebelum Perubahan)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN				
1.	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	1. Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *)IKU	1,3 %	Menghitung jumlah temuan BPK atas laporan keuangan kementerian perindustrian yang bernilai uang dengan ketentuan jumlah temuan bernilai uang memiliki jumlah <1,3% total anggaran Kementerian Perindustrian atau Rumus: Temuan BPK/realisasi anggaran Belanja Kemenperin TA 2021
		2. Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti	6 %	Jumlah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dibagi dengan total rekomendasi hasil pengawasan selama 1 tahun
		3. Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	85%	Jumlah total aduan yang telah masuk ke sistem Dumas dan telah didistribusikan ke unit terkait dibagi jumlah total aduan yang telah masuk ke dalam sistem Dumas

		4. Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker *)IKU	92%	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti dengan status Sesuai Rekomendasi (SR) maupun Belum Sesuai Rekomendasi (BSR) sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat oleh satker di bagi dengan jumlah total rekomendasi atau rumus : (SR+BSR)/total rekomendasi tahun sebelumnya (T-1)
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1. Indeks penerapan manajemen risiko(MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU	Level 3	Level MRI dinilai dengan memperhatikan beberapa unsur dalam manajemen risiko, antara lain prinsip dan kerangka kerja manajemen risiko instansi, serta proses manajemen risiko di instansi tersebut.
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL				
3.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	1. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	80%	Melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi dengan alat bantu kuesioner, Capaian masing-masing Inspektorat diambil berdasarkan nilai unit kerja yang menjadi cakupan
		2. Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	78%	Dengan menginventarisir penugasan audit yang dilakukan dengan bantuan 5 (lima) aplikasi yaitu Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), SiPantau, Sakip Online, PMPRB, PMPZI. Cara ukur: Kegiatan Audit Pengawasan secara elektronik dibagi dengan total kegiatan audit pengawasan.

4.	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri	1. Presentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat II *)IKU	80%	<p>Realisasi Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri di Inspektorat Jenderal (R_{P3DN})= $\frac{RA_{P3DN}}{TotAP3DN}$</p> <p>Keterangan:</p> <p>RA_{P3DN} = Realisasi Anggaran berdasarkan akun untuk belanja produk Dalam Negeri (DN)</p> <p>$TotAP3DN$ = Total pagu anggaran P3DN berdasarkan akun yang telah disepakati yaitu, 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111</p>
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN				
5.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1. Tingkat Kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	90%	Menghitung tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan dengan kegiatan pengawasan yang tertuang dalam PKPT.
		2. Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	100%	Kesesuaian peran pengawasan auditor dengan sertifikasi JFA terakhir yang dimiliki.

Tabel 2. Indikator Kinerja Inspektorat II Berdasarkan Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2022 (Setelah Perubahan)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN				
1.	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	1. Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *)IKU	1,3 %	Menghitung jumlah temuan BPK atas laporan keuangan kementerian perindustrian yang bernilai uang dengan ketentuan jumlah temuan bernilai uang memiliki jumlah <1,3% total anggaran Kementerian Perindustrian atau Rumus: Temuan BPK/realisasi anggaran Belanja Kemenperin TA 2021
		2. Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	90%	Jumlah total aduan yang telah masuk ke sistem Dumas dan telah didistribusikan ke unit terkait dibagi jumlah total aduan yang telah masuk ke dalam sistem Dumas
		3. Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker *)IKU	92%	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti dengan status Sesuai Rekomendasi (SR) maupun Belum Sesuai Rekomendasi (BSR) sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat oleh satker di bagi dengan jumlah total rekomendasi atau rumus :

				(SR+BSR)/total rekomendasi tahun sebelumnya (T-1)
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1. Indeks penerapan manajemen risiko(MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU	Level 3	Level MRI dinilai dengan memperhatikan beberapa unsur dalam manajemen risiko, antara lain prinsip dan kerangkakerja manajemen risiko instansi, serta proses manajemen risiko di instansi tersebut. Nilai yang digunakan adalah nilai indeks manajemen risiko hasil penilaian mandiri Kementerian Perindustrian yang telah mendapatkan QA oleh APIP (jika memungkinkan, dilakukan usulan revisi target berdasarkan range level 3 ke Biro Perencanaan)
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL				
3.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	1. Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal	80%	Dapat diukur melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi dengan alat bantu kuesioner yang disusun berdasarkan AAIPI. Pada tahun 2022, kuesioner akan disebarakan setiap kali melakukan kegiatan pengawasan dan diolah oleh masing-masing Kasubag Tata Usaha Setiap Inspektorat disetiap akhir Triwulan dan setiap akhir tahun. Persentase tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan diperoleh berdasarkan respon auditi yang masuk dan berada pada tingkat "sangat baik". Nilai 100% diperoleh jika seluruh auditi menjawab "sangat baik" atau nilai maksimal dari setiap pertanyaan untuk semua pertanyaan dan simpulan akhir

			kuesioner. Cara pengukuran mengacu pada PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017
		2. Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	<p>78%</p> <p>Pengukuran Kegiatan TABK dilakukan hanya pada Kegiatan Audit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tahap Perencanaan: Menerapkan RBA (Risk Based Audit) Kuantitatif dalam penetapan sampling audit. Cara Pengukuran, apakah pada saat audit auditor menggunakan analisis untuk menentukan sampling - Tahap Pengumpulan data yang akan diuji menggunakan Sipantau, E-mon, dan SAS (Screenshot penggunaan aplikasi) *pemberian akses ke seluruh auditor - Penelaahan analisis, menggunakan alat bantu komputer (Excel,SQL, Access, dll) <p>*Bukti Hasil Telaahan pada semua keg Pengawasan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan kertas kerja pemeriksaan menggunakan Aplikasi komputer (Dropbox, MSteam,Gdrive, dll) - Ikhtisar, sort, merge, split, ratio untuk analisis data - Tahap Pelaporan menggunakan Office

4.	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri	1. Presentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat II *)IKU	80%	<p>Realisasi Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri di Inspektorat Jenderal (R_{P3DN})= $\frac{RA_{P3DN}}{TotAP3DN}$</p> <p>Keterangan:</p> <p>RA_{P3DN} = Realisasi Anggaran berdasarkan akun untuk belanja produk Dalam Negeri (DN)</p> <p>$TotAP3DN$ = Total pagu anggaran P3DN berdasarkan akun yang telah disepakati yaitu, 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111</p>
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN				
5.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1. Tingkat Kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	90%	Menghitung tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan dengan kegiatan pengawasan yang tertuang dalam PKPT.
		2. Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	100%	Kesesuaian peran pengawasan auditor dengan sertifikasi JFA terakhir yang dimiliki.

Capaian Indikator kinerja di reviu secara rutin per tiga bulan melalui Laporan PP 39 Inspektorat II, setelah di evaluasi perlu adanya perubahan dalam perjanjian kinerja Inspektorat Jenderal. Alasan terjadinya perubahan cara pengukuran yang terjadi pada indikator kinerja 1.4 Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker karena dianggap kurang sesuai, maka untuk mendapatkan hasil yang relevan dan telah tuntas, perhitungan rekomendasi menggunakan saldo rekomendasi 1 tahun sebelumnya (T-1). Dan pada Indikator Kinerja 3.3 Penerapan TABK juga terjadi perubahan pada metode atau aplikasi yang digunakan dalam pengukuran indikator Kemudian pada indikator kinerja 4.1 tabel 5 (sebelum revisi) terjadi perubahan dan diganti indikator kinerja, pada tahun 2022 indikator Kinerja 1.2 dihilangkan karena Auditor didorong untuk memberikan rekomendasi yang bisa di tindaklanjuti, berdasarkan Permenperin Nomor 29 Tahun 2021 tentang Renstra Kementerian Perindustrian yang terbaru yang disahkan pada tanggal 22 Desember 2021.

Tabel 3. Rencana Kinerja TA 2022

NO.	SASARAN PROGRAM	Kode	INDIKATOR KINERJA	TARGET
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN				
1	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	S1	Batas Toleransi Temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II *IKU	1,3%
		S2	Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti pada Cakupan Tugas Inspektorat II	90%
		S3	Rekomendasi Hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat *IKU	92%
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	S4	Koordinasi Penilaian Indeks Penerapan manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *IKU	Level 3
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL				
3	Terselenggaranya Pengawasan Internal Yang Efektif	T1	Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat II	80%
		T2	Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	78%
4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	T1	Presentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Inspektorat II *IKU	80%
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN				
5	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	L1	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	90%
		L2	Tingkat Kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	100%

C. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2022

Inspektorat II pada tahun 2022 mempunyai Kegiatan "Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat II" dengan anggaran sebesar Rp1.925.000.000,- , Nilai ini adalah nilai anggaran setelah mengalami beberapa pemblokiran dan penambahan dari anggaran semula sebesar Rp 2.050.000.000,- pada triwulan I anggaran diblokir sebesar Rp100.000.000,- dan pada Triwulan II anggaran diblokir Rp125.000.000,- jadi total Blokir sebesar Rp225.000.000,- Pada Triwulan IV Mendapatkan Tambahan Anggaran Sebesar Rp 100.000.000,- yang terdiri dari Layanan Perencanaan dan Penganggaran, Layanan Pemantauan dan Evaluasi, dan Layanan Audit Internal Inspektorat II. Alokasi anggaran kegiatan tersebut terdiri dari:

Tabel 4. Alokasi Anggaran Inspektorat II Tahun 2022

Kode	Uraian	Vol	Pagu Awal	Pagu Revisi
1842	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat II		2.050.000.000	1.925.000.000
1842.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Dokumen	25.110.000	24.912.000
051	Penyusunan Program Kerja dan Anggaran		25.110.000	24.912.000
A	Pengelolaan Arsip dan Ketatausahaan Inspektorat II		15.866.000	11.916.000
B	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Inspektorat II		4.622.000	6.374.000
C	Koordinasi Penyusunan Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat II		4.622.000	6.622.000
1842.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5 Dokumen	24.890.000	25.088.000
051	Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Inspektorat II		24.890.000	25.088.000

A	Penyusunan Laporan PP39 (Triwulanan)		9.244.000	6.100.000
B	Penyusunan LAKIP Inspektorat II		7.402.000	7.744.000
C	Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Inspektorat II		8.244.000	11.244.000
1842.TBD. 965	Layanan Audit Internal	23 Dokumen	2.000.000.000	1.875.000.000
051	Audit Program dan Kegiatan Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat II		1.039.990.000	791.699.000
A	Audit Kinerja pada Program Penumbuhan dan Pengembahan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika		125.915.000	122.855.000
B	Audit Kinerja pada Program Pengembangan dan Penumbuhan Industri Kecil, Menengah dan Aneka dan BPIPI Sidoarjo		174.055.000	139.140.000
C	Audit Pengelolaan Dana Dekonsentrasi PIKM Pada Dinas Perindustrian Provinsi		658.559.000	529.704.000
D	Audit Dengan Tujuan Tertentu Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat II		81.461.000	---
052	Reviu Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat II		124.342.000	85.505.000
A	Reviu Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara		80.355.000	50.592.000
B	Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan		30.743.000	22.472.000
C	Reviu Rencana Kerja Anggaran		6.622.000	6.627.000
D	Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara		6.622.000	6.114.000
053	Monitoring dan Evaluasi SAKIP Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II		4.622.000	4.622.000
A	Evaluasi dan Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		4.622.000	4.622.000
054	Konsulting dan Pengawasan Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat II		831.046.000	892.874.000

A	Pengawasan Kegiatan Prioritas Kementerian dan Nasional		283.762.000	428.679.000
B	Pengawasan Program dan Kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional Ditjen ILMATE dan Ditjen IKMA		252.802.000	155.626.000
C	Konsultasi dan Pembinaan Dalam Rangka Peningkatan Peran Pengawasan Inspektorat II		294.482.000	308.569.000

D. DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Penetapan Kinerja merupakan tekad atau janji rencana kerja tahunan yang akan dicapai antara Inspektur II yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan Inspektur Jenderal.

Penetapan kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan dalam satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Ruang lingkup penetapan kinerja mencakup seluruh tugas pokok dan fungsi suatu organisasi dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.

Namun seiring dengan berjalannya program kegiatan, sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan pada awal tahun 2022, sasaran Inspektorat II pada tahun 2022 berubah menjadi seperti tabel 1.

Jika sasaran tersebut dikaitkan dengan kegiatan yang tertuang dalam DIPA, maka sasaran kinerja tersebut dapat dicapai melalui:

1. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian (assurance) melalui Layanan Audit Inspektorat II dan Layanan Reviu Inspektorat II.
2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (consulting) melalui Layanan Monitoring dan Evaluasi Cakupan Tugas Inspektorat II.
3. Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif melalui layanan Reviu RKA-KL satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II.

4. Meningkatnya pemanfaatan industri barang dan jasa dalam negeri melalui penyusunan Dokumen Penganggaran dan Akuntabilitas Inspektorat II
5. Terselenggaranya system manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien melalui layanan Penyusunan Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

Sasaran dan Indikator Kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2022 dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 5. Perjanjian Kinerja TA 2022

NO.	SASARAN PROGRAM	Kode	INDIKATOR KINERJA	TARGET
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN				
1	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	S1	Batas Toleransi Temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II *IKU	1,3%
		S2	Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti pada Cakupan Tugas Inspektorat II	90%
		S3	Rekomendasi Hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat *IKU	92%
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	S4	Koordinasi Penilaian Indeks Penerapan manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *IKU	Level 3
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL				
3	Terselenggaranya Pengawasan Internal Yang Efektif	S1	Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat II	80%
		S2	Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	78%
4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam	S1	Presentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Inspektorat II *IKU	80%

	Negeri			
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN				
5	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	S1	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	90%
		S2	Tingkat Kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	100%

Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat II Tahun 2022 antara lain:

- a. Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal pada cakupan tugas Inspektorat II *) IKU;
- b. Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat II *) IKU;
- c. Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU;
- d. Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat Jenderal *)IKU.

Untuk melaksanakan rencana kinerja tersebut Inspektorat II pada tahun 2022 melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Layanan Audit Inspektorat II:
 - a) Audit Kinerja Unit Pusat dan Vertikal;
 - b) Audit Dana Dekonsentrasi Perindustrian;
 - c) Audit Khusus;
2. Layanan Reviu Inspektorat II :
 - a) Reviu Laporan Keuangan/BMN Inspektorat II pada Semester I dan II;
 - b) Reviu PIPK (Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan);
 - c) Reviu Perencanaan Anggaran (RKA-KL) pada Unit Pusat, Vertikal dan Dekonsentrasi;
 - d) Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RK BMN)
3. Layanan Monitoring Dan Evaluasi Inspektorat II:

- a) Monitoring dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- b) Pengawasan Penggunaan Produk Dalam Negeri ;
4. Consulting dan Pengawasan
 - a) Pengawasan Kegiatan Prioritas Kementrian dan Nasional;
 - b) Pengawasan Program dan Kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional;
 - c) Konsultasi dan Pembinaan Dalam Rangka Peningkatan Peran Pengawasan;
5. Layanan Manajemen Pengawasan Inspektorat II;.
6. Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Akuntabilitas Inspektorat II.

Tabel 6. Target dan capaian output Inspektorat II Tahun 2022

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	TW I	TW II	TW III	TW IV
001	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	-
002	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-
003	Audit Program dan Kegiatan Pada satker Cakupan Tugas inspektorat II	2 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen
004	Reviu pada satker Cakupan Tugas Inspektorat II	17 Dokumen	6 Dokumen	1 Dokumen	7 Dokumen	3 Dokumen
005	Monitoring dan Evaluasi SAKIP	3 Dokumen	-	2 Dokumen	-	1 Dokumen
006	Konsulting dan Pengawasan pada satker Cakupan Tugas Inspektorat II	2 Dokumen	-	-	-	2 Dokumen

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Inspektorat II merupakan perwujudan dari pertanggung jawaban Inspektur II kepada Inspektur Jenderal, khususnya mengenai pengawasan atas penyelenggaraan tugas pokok Kementerian Perindustrian pada tahun 2022. Untuk mendapatkan penilaian atas pelaksanaan tugas Inspektorat II dilakukan melalui pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat Jenderal. Pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja.

A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 yaitu :

No	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja (IK)	Target	Realisasi	Ket
PERSSEFEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN					
1	Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	1. Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal pada cakupan tugas Inspektorat II*) IKU	1,3%	0%	Tercapai Target
		2. Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti pada cakupan tugas Inspektorat II	90%	100%	Tercapai Target
		3. Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat II *) IKU	92%	76,47%	Belum Tercapai Target
2	Terwujudnya tata kelola	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI)	Level	Level 2	Belum Tercapai

	pemerintahan yang baik	Kementerian Perindustrian *)IKU	3		Target
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL					
3	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	1. Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat II dengan Standar Pelaksanaan Pengawasan	80%	91,85%	Tercapai Target
		2. Penerapan TABK (Teknik Audit Berbasis Komputer)	78%	89.14%	Tercapai Target
4	Meningkatnya pemanfaatan industri barang dan jasa dalam negeri	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat II *)IKU	80%	96.38 %	Tercapai Target
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN					
5	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1. Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	90%	95.24%	Tercapai Target
		2. Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	100%	100%	Tercapai Target

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa beberapa capaian target kinerja dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat II telah menunjukkan hasil dan indikasi bahwa pelaksanaan program/kegiatan berjalan lancar meskipun sedikit ada hambatan dikarenakan setiap bulan dilakukan revisi anggaran disebabkan pada Aplikasi Sakti Kementrian Keuangan yg di input berdasarkan Rincian Detil Account, sehingga proses realisasi anggaran sedikit mengalami keterlambatan. Berikut Analisis capaian indikator kinerja Inspektorat II tahun 2022:

• **PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN**

1. Meningkatnya efektifitas, efesiensi, dan ketaatan terhadap perundang-undangan (assurance)

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	a. Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal pada cakupan tugas Inspektorat II*) IKU	1,3%	0%
		b. Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti pada cakupan tugas Inspektorat II	90%	100%
		c. Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat II*) IKU	92%	76,47%

a. Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II target 1,3%, Realisasi Anggaran pada Ditjen IKMA TA. 2021 sebesar Rp220.313.650.048,- dan Realisasi Anggaran pada Ditjen ILMATE TA. 2021 sebesar Rp 237.693.796.000,- Total Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal IKMA dan Direktorat Jenderal ILMATE sebesar Rp458.007.446.048,- Temuan material pada cakupan tugas Inspektorat II adalah Rp. 0,- (tidak ada temuan material). Maka Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal pada Cakupan Tugas Inspektorat II = $\frac{\text{Temuan BPK pada Cakupan Tugas Inspektorat II}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja pada Cakupan Tugas Inspektorat II TA 2021}} = \frac{\text{Rp}0,-}{\text{Rp}458.007.446.048,-} = 0\%$, jadi realisasi capaian kinerja Batas Toleransi Temuan Material : 0% telah mencapai target.

Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2019 - 2022 sebagai berikut :

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	T 2019	R 2019	T 2020	R 2020	T 2021	R 2021	T 2022	R 2022
1	Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap perundang-undangan	1. Presentase temuan BPK di bawah materiality threshold	<3 %	0,09 4%	<3 %	0,08 9%	<2,8 %	0,15 %	1,4%	0%

Target vs Realisasi



Grafik 2. Realisasi Tahun 2019-2022

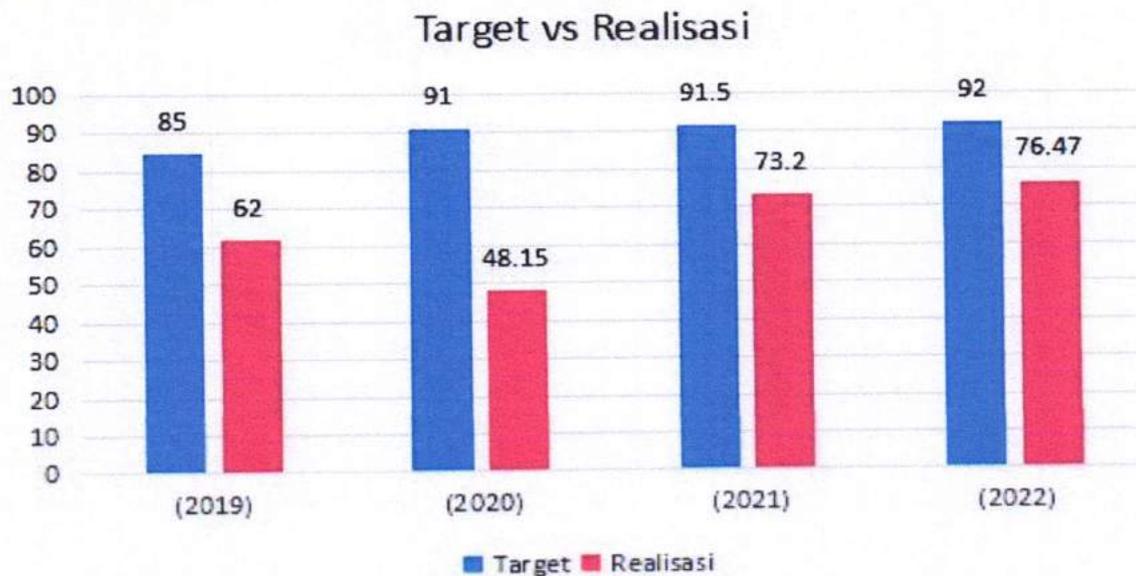
B. Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan yang ditindaklanjuti dengan target 90%, realisasi capaian kinerja pada Triwulan IV (Oktober sampai dengan Desember) sesuai cakupan tugas Inspektorat II yaitu pada Direktorat Jenderal ILMATE dan Direktorat Jenderal IKMA, yang berkadar pengawasan belum ada (Nol Persen), realisasi capaian Kinerja 100 persen. Pengaduan masyarakat pada Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, menerima 15 (Lima Belas) kali pengaduan, yang terdiri dari 13 (tiga belas) pengaduan tentang pelayanan masyarakat terkait keterlambatan proses penyelesaian pertimbangan teknis impor barang pada Direktorat industri logam dan 2 (dua) pengaduan tentang permohonan TPT kendaraan bermotor pada Direktorat Industri Maritim, Alat

Transportasi dan Alat pertahanan. Pada Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka pada triwulan IV ini tidak ada pengaduan masyarakat yang masuk. Seluruh pengaduan masyarakat tersebut telah disampaikan seluruhnya kepada masing-masing unit terkait agar segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan, sedangkan yang sifatnya umum dan pengaduan lainnya telah langsung dijawab sesuai ketentuan.

- c. Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat II dengan target 92%, realisasi capaian kinerjanya Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Triwulan IV adalah sebesar 76,47%.

Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2019-2022 sebagai berikut:

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	T 2019	R 2019	T 2020	R 2020	T 2021	R 2021	T 2022	R 2022
1	Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (assurance)	2. Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat II	85%	62%	91%	48,15%	91,5%	73,2%	92%	76.47%



Grafik 3. Target vs Realisasi Tahun 2019-2022

2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Yang Baik

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	T 2021	R 2021	T 2022	R 2022
2.	Terwujudnya tata Kelola Pemerintahan yang baik	Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU	Level 3	2,62	Level 3	2.85

Indeks penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kemenperin dengan target Level 3, pada Triwulan IV nilai capaian sebesar 95 % yang merupakan nilai pada level Kementerian Perindustrian dengan nilai MRI sebesar 2,85 Hasil penjaminan kualitas dapat disimpulkan bahwa nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP sebesar 3,063, Indek Penerapan Manajemen Resiko (MRI) sebesar 2,85, Indek Efektifitas Pencegahan Korupsi (IEPK) sebesar 3,65 dan Kapabilitas APIP sebesar 2. Secara

umum, hasil penilaian mandiri dan penjaminan kualitas menunjukkan perlu dilakukan perbaikan (*Area of Improvement /Aoi*) pada tahapan sebagai berikut: penetapan tujuan, struktur dan proses dan pencapaian tujuan.

- **PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL**

3. Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
3.	Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat II	80%	91.85%
		Penerapan TABK (Teknik Audit Berbasis Komoputer)	78%	89.14%

Sasaran Program Terselenggaranya Pengawasan Internal Yang Efektif dengan indikator kinerja:

- Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat II target 80%, dilakukan melalui survei kepuasan pelanggan dalam hal ini auditi. Langkah pengukuran data mengacu pada Permen PAN RB Nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik. Realisasi capaian kinerjanya pada Triwulan IV berdasarkan audit yang telah dilakukan Inspektorat II pada Direktorat Jenderal IKMA, dengan Klarifikasi Nilai Indeks sangat Baik dengan nilai 95,21 %. Capaian Kinerja sampai dengan Triwulan IV (Januari sampai dengan Desember adalah 91,85% dengan Kalrifikasi Nilai Indeks Sangat Baik.
- Persentase Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK) dengan target 78%, dengan indikator pengukuran Kegiatan TABK dilakukan hanya pada Kegiatan Audit dengan tahapan sebagai berikut:
 - Tahap Perencanaan: Menerapkan RBA (Risk Based Audit) Kuantitatif dalam penetapan sampling audit. Cara Pengukuran, apakah pada saat audit auditor menggunakan analisis untuk menentukan sampling

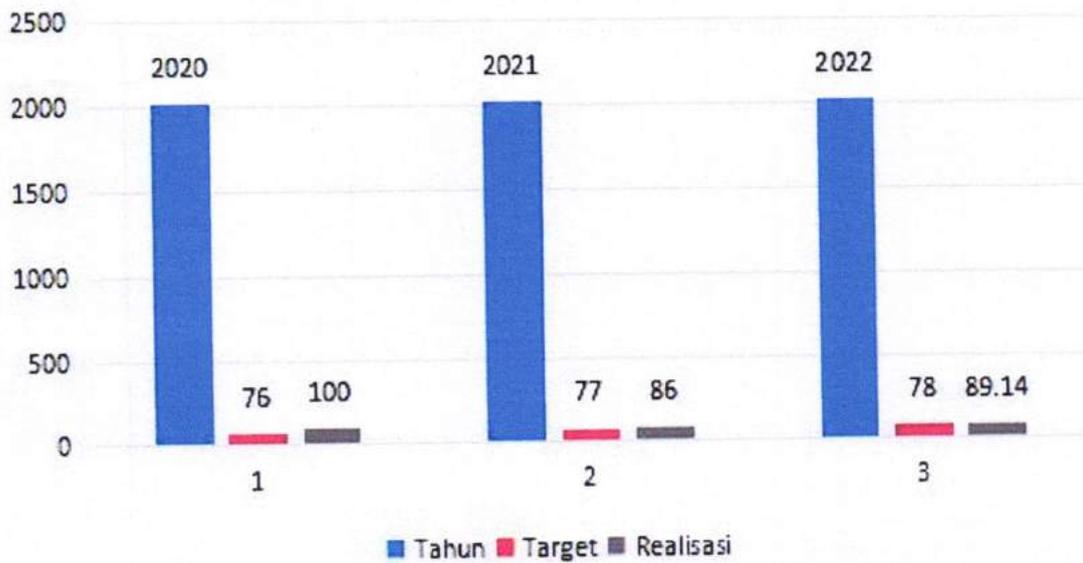
- Tahap Pengumpulan data yang akan diuji menggunakan Sipantau, E-mon, dan SAS;
- Penelaahan analisis, menggunakan alat bantu komputer (Excel,SQL, Access, dll);
- Penyusunan kertas kerja pemeriksaan menggunakan Aplikasi komputer (Dropbox, MSteam,Gdrive, dll)
- Ikhtisar, sort, merge, split, ratio untuk analisis data
- Tahap Pelaporan menggunakan Office.

Pada triwulan IV telah dilakukan audit pada Direktorat Jenderal IKMA dengan realisasi capaian pada Triwulan IV sebesar 94,44%. realisasi capaian kinerja dari bulan Januari sampai dengan Desember sebesar 89,14% (Audit Direktorat Jenderal ILMATE, audit Dana Dekonsentrasi pada 16 Provinsi, Audit pada BPIPI Sidoarjo dan Audit pada Direktorat Jenderal IKMA) .

Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 – 2022:

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	T 2020	R 2020	T 2021	R 2021	T 2022	R 2022
3.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang efektif	Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	76%	100%	77%	86%	78%	89.14%

Target vs Realisasi



Grafik 4. Target vs Realisasi Tahun 2020-2022

4. Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	T 2021	R 2021	T 2022	R 2022
4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	Persentase Nilai Capaian Penggunaan produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat II *)IKU	75%	99,05%	80%	96.38 %

Presentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan jasa target 80%, dengan indikator pengukuran berdasarkan total pagu anggaran P3DN berdasarkan akun belanja barang yang ada di Inspektorat II yaitu 521811, 521219, 521211, 522192, 524119 senilai Rp159.712.000,- dan realisasi anggaran sampai dgn Triwulan IV (Oktober sampai dengan Desember) sebesar Rp29.814.900,- realisasi capaian kinerjanya 18,86 % (realisasi anggaran dibagi total anggaran). Capaian Kinerja dari bulan Januari - Desember Tahun Anggaran 2022 sebesar 96.38% atau Rp153.935.608,-

- **PERSPEKTIF KELEMBAGAAN**

5. Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
5.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	a. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	80%	85,29%
		b. Tingkat Kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	90%	95,07%

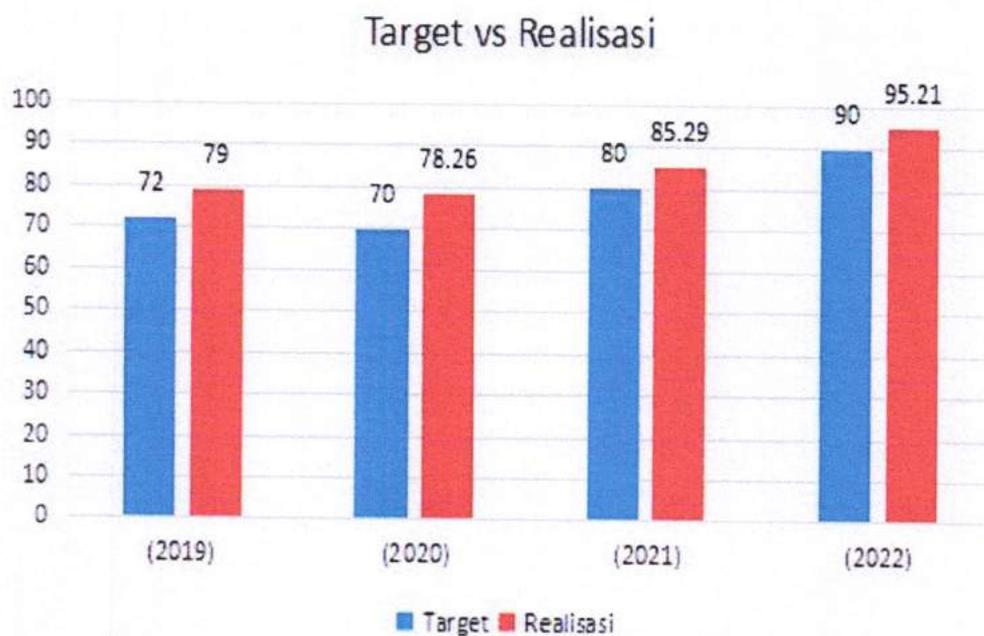
:

- A. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT dengan target 90%, realisasi capaian kinerjanya pada Triwulan IV (Oktober - Desember) dapat diukur berdasarkan kegiatan pengawasan internal yang sudah selesai dilakukan berdasarkan PKPT cakupan tugas Inspektorat II yaitu Melaksanakan Audit Kinerja pada Direktorat Jenderal IKMA, melaksanakan Pengawasan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Pengawasan Kegiatan Direktorat Jenderal ILMATE dan Direktorat

Jenderal IKMA. Pelaksanaan kegiatan pengawasan internal yang sesuai dengan PKPT (kesesuaian Surat Tugas dengan +/- 14 hari dari jadwal yang tertera di PKPT) pada Triwulan IV ada 3 Kegiatan (dari 3 kegiatan Inpektorat II dalam PKPT Sesuai dengan PKPT), capaian Realisasi Triwulan IV (Oktober-Desember) adalah 100 %, Capaian realisasi sampai dengan triwulan IV (Januari-Desember) adalah 95.24 % (dari 21 kegiatan yang sudah dilaksanakan , ada 2 kegiatan yg belum sesuai dengan PKPT).

Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2019-2022 sebagai berikut:

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	T 2019	R 2019	T 2020	R 2020	T 2021	R 2021	T 2022	R 2022
5.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	72%	79%	70%	78,26%	80%	85,29%	90%	95.24%

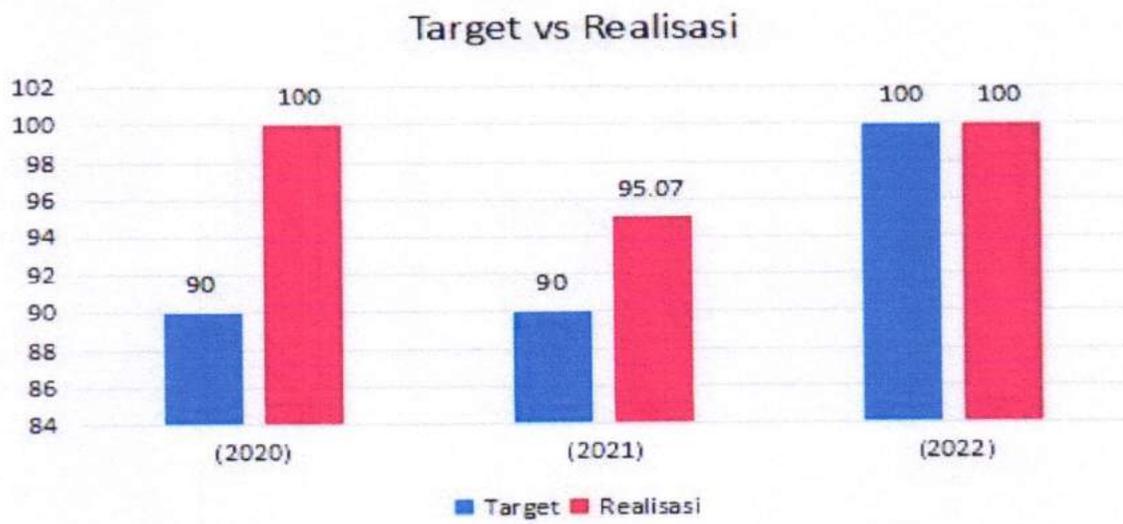


Grafik 5. Target vs Realisasi Tahun 2019-2022

b. Tingkat Kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya dengan target 100%, Adapun tingkat kesesuaian diukur berdasarkan kesesuaian penugasan dan surat tugas dengan peran pengawasan auditor sesuai sertifikasi JFA terakhir yang dimiliki. Ada penugasan yang perannya dinaikan atau diturunkan satu tingkat dari jabatan fungsional auditor yang dimiliki sesuai dengan Permenpan Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 Pasal 10 yang berbunyi Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat auditor yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1 dan 2), auditor lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan. Realisasi capaian kerjanya pada Triwulan IV sebesar 100% (Dari 246 penugasan pada 86 kegiatan, yang naik atau turun jenjang jabatannya tidak ada). Dan capaian Kinerja dari bulan Januari sd Desember sebesar 100 %. Naik atau turun jenjang jabatan ini disebabkan kurangnya auditor pertama (anggota tim) sehingga auditor ahli diperankan sebagai auditor pertama (anggota tim). Dari 1.031 penugasan jumlah ketidaksesuaian peran penugasan tidak ada, sehingga realisasi Januari sampai Desember sebesar 100%.

Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2020-2022 sebagai berikut:

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	T 2020	R 2020	T 2021	R 2021	T 2022	R 2022
2.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	2. Tingkat Kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	90%	100%	90%	95,07%	100%	100%



Grafik 6. Target vs Realisasi Tahun 2020-2022

Tabel 7. Informasi Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Inspektorat II Tahun 2022

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI 2021	KEGIATAN PENDUKUNG OUTCOME
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN					
1	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *)JKU	<1,3%	Total Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal IKMA dan Direktorat Jenderal ILMATE sebesar Rp458.007.446.048,- Temuan material pada cakupan tugas Inspektorat II adalah Rp. 0,- maka, batas toleransi temuan= <u>temuan BPK</u> Realisasi Anggaran Belanja Kemenperin TA 2020 jadi, batas toleransi temuanmaterial: 0% telah mencapai target	<ul style="list-style-type: none"> - Audit Kinerja, Audit Khusus, Reviu RKAKL - Monev SAKIP satuankerja cakupan tugas Inspektorat II - Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Produk Dalam Negeri - Konsultasi dan Pengawasan Satker Cakupan Tugas Inspektorat II - Reviu Laporan Keuangan dan BMN satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II - Reviu pengendalian Intern atas pelaporan keuangan

		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti	90%	Berdasarkan Laporan Klinik, Pengaduan yang berkadar pengawasan Bulan Januari- Desember 2022 cakupan tugas Inspektorat II, Jumlah Pengaduan yang diterima sebanyak 143 kali pengaduan, seluruhnya bersifat tidak berkadar pengawasan. Seluruh pengaduan telah ditindaklanjuti. (100%).	Pengawasan sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat
		Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satuan kerja *)IKU	92%	Rekapitulasi Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal atas hasil audit Tahun 2021. Dari total rekomendasi 153 rekomendasi, Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sebanyak 117. Sesuai rekomendasi 107 dan belum sesuai rekomendasi sebanyak 10. Capaian rekomendasi sebesar $(107+10)/153*100\% = 76.47\%$	Pemantauan Tindak Lanjut hasil pengawasan
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik	Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU	Level 3	Berdasarkan laporan hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Perindustrian TA 2021-2022 Nomor B/428/SJ-IND/KU/X/2022 tanggal 7 Oktober 2022. Diperoleh hasil bahwa nilai MRI Kementerian Perindustrian sebesar 2,850.	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP sebesar 3,063, Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) sebesar 2,85, Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi (IEPK) sebesar 3,65 dan Kapabilitas APIP sebesar 2.

PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL

3	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat II	80%	Dilakukan melalui survey kepuasan pelanggan Inspektorat Jenderal, dalam hal ini auditi. Langkah pengukuran data mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Dari perhitungan yang dilakukan 20 responden (auditi) cakupan tugas Inspektorat II, diperoleh bahwa nilai indeks kepuasan pelanggan sebesar 91.85% dengan kategori kinerja unit pelayanan Baik dan mutu pelayanan Baik.	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Program Kerja dan Anggaran - Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas - Koordinasi peran pengawasan lainnya cakupan tugas Inspektorat II
		Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	78 %	Realisasi capaian kinerja dari bulan Januari sampai dengan Desember TA.2022 sebesar 89,14%	pengukuran Kegiatan TABK dilakukan hanya pada Kegiatan Audit

4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal *)IKU	80%	Perbandingan Pagu dan realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri Inspektorat II $153.935.608/159.712.000 \times 100\% = 96,38\%$	Berdasarkan Realisasi Akun Belanja barang di Inspektorat II yaitu 521811, 521219, 521211, 522192, 524119 dibagi total anggaran.
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN					
5	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	90%	Capaian realisasi Tahun Anggaran 2022 (Januari-Desember) adalah 95.24 % (dari 21 kegiatan yang sudah dilaksanakan , ada 2 kegiatan yg belum sesuai dengan PKPT)	Penyusunan Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat II
		Tingkat Kesesuaian Penugasan SDM Pengawasan Sesuai dengan Perannya	100%	Dari 1.031 penugasan jumlah ketidaksesuaian peran penugasan tidak ada, sehingga realisasi januari sampai Desember sebesar 100%	Kesesuaian peran pengawasan auditor dengan sertifikasi JFA terakhir yang dimiliki sesuai Permenpan Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 naik atau turun satu tingkat peran diperbolehkan.

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022:

Capaian Kinerja Tahun 2019

NO.	SASARAN PROGRAM	KODE	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	KET
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN						
1	Meningkatnya Akuntabilitas, Efektifitas, Efisiensi, dan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	S1	Persentase laporan keuangan satuan kerja yang sesuai SAP dan peraturan perundang-undangan *) IKU	95%	50%	
		S2	Penyelesaian tindak lanjut saran/rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh satuan kerja cakupan tugas *) IKU	85%	63,64%	
		S3	Persentase temuan BPK di bawah materiality threshold	<3%	0,089253%	
		S4	Rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola pemerintahan yang ditindaklanjuti *) IKU	60%	100%	
		S5	Persentase Nilai SAKIP Unit Eselon I yang mendapatkan nilai AA	75%	(0%)Tidak tercapai	
		S6	Persentase jumlah rekomendasi hasil revidu perencanaan dan anggaran yang ditindaklanjuti *) IKU	80%	100	
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL						
2	Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan	T1	Persentase tingkat kesesuaian terhadap pelaksanaan Program Kerja Pengawasan	72%	79%	

	Internal yang efektif		Tahunan (PKPT)			
		T2	Persentase pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan *) IKU	85 %	100%	
PERSPERKTIF KELEMBAGAAN						
3	Tersedianya bahan informasi pengawasan dalam rangka menunjang kegiatan pengawasan yang mudah diakses	L1	Persentase pelaksanaan pengawasan yang berbasis IT	50 %	100%	
4	Terwujudnya birokrasi yang efektif dalam lingkup pengawasan internal	L2	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal	Nilai AA	Tidak tercapai target	

Capaian kinerja tahun 2020

No	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja (IK)	Target	Realisasi	Ket
Perspektif Pemangku Kepentingan					
1	Terwujudnya keefektifan dan keefisienan Program Kerja Unit Kerja Cangkupan Tugas Inspektorat II)	1. Batas Toleransi Temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II *IKU	2,8%	0,15%	Tercapai target
		2. Maksimum Rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cangkupan Tugas Inspektorat II	5%	100%	Tercapai target
		3. Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti sesuai cangkupan tugas Inspektorat II	80%	100%	Tercapai target
		4. Rekomendasi hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti oleh satker sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan pada cangkupan tugas Inspektorat II)*IKU	80%	48,15%	Tidak tercapai target
2	Terwujudnya tata Kelola Pemerintahan Unit Kerja	Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MRI) Cangkupan Tugas Inspektorat II)*IKU	3,6	100%	Tercapai Target

	cangkupan Tugas Inspektorat II yang baik				
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL					
3	Terselenggaranya Pengendalian Pengawasan Internal yang efektif	1. Tingkat Kesesuaian pelaksanaan pengawasan di Inspektorat II dengan standar pelaksanaan Pengawasan	75%	97,2%	Pelaksanaan pengawasan sudah sesuai dengan standar pengawasan
		2. Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	76%	100%	Dari 3 kegiatan audit yang sudah dilaksanakan Inspektorat II
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN					
4	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	70%	78,26%	16 dari 23 Jenis kegiatan Inspektorat II dalam PKPT
		2. Tingkat Kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	80%	100%	Dari kegiatan pengawasan yg telah dilakukan semua sesuai dengan perannya

Capaian kinerja tahun 2021

No	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja (IK)	Target	Realisasi	Ket
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN					
1	Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	1. Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal pada cakupan tugas Inspektorat II *) IKU	1,40%	0,0551%	
		2. Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat II	8%	0%	Capaian 100%
		3. Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti pada cakupan tugas Inspektorat II	85%	100%	Capaian 117%
		4. Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat II *) IKU	91,50%	72,3%	Capaian 80%
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian*)IKU	Level 3	2, 62	Capaian 87,33%
PERSPEKTIF PROSES INTERNAL					
3	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	1. Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan di Inspektorat II dengan Standar Pelaksanaan Pengawasan	75%	85,71%	Capaian 114 %
		2. Penerapan TABK (Teknik Audit Berbasis Komputer)	77%	86 %	Capaian 111%
4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal *)IKU	75%	99,05%	Capaian 132%

PERSPEKTIF KELEMBAGAAN						
5	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1. tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	80%	85,29%	Capaian 106%	
		2. Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	90%	95,07%	Capaian 105%	

Capaian kinerja tahun 2022

NO.	SASARAN PROGRAM	Kode	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	KET
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN						
1	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	S1	Batas Toleransi Temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II *IKU	1,3%	0%	Capaian 100%
		S2	Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti pada Cakupan Tugas Inspektorat II	90%	100%	Capaian 111%
		S3	Rekomendasi Hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat II *IKU	92%	76.47%	Capaian 83.12%

2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	S4	Koordinasi Penilaian Indeks Penerapan manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *IKU	Level 3	Level 2	Capaian 66,67 %
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL						
3	Terselenggaranya Pengawasan Internal Yang Efektif	T1	Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat II	80%	91,85%	Capaian 114.8%
		T2	Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	78%	89.14%	Capaian 114%
4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	T3	Presentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Inspektorat II *IKU	80%	96.38 %	Capaian 120%
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN						
5	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	L1	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	90%	95.24%	Capaian 106 %
		L2	Tingkat Kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	100%	100%	Capaian 100 %

Tabel 8. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Inspektorat II Inspektorat Jenderal Tahun 2020

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/IKU	Satuan	Target					Output Berdasarkan korelasi peta strategis dan pohon kinerja	Alokasi (Dalam Miliar Rupiah)					Aktifitas Utama
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
	Peningkatan Pengawasan dan akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat II							1,211	8,325	8,325	8,325	8,325		
	Perspektif Pemangku Kepentingan													
SK 1	Terwujudnya keefektifan dan Efisiensi Pelaksanaan Progrm Kementerian Perindustrian													

	1	Batas Toleransi temuan material Pengawasan external pada cangkupan tugas Inspektorat II)*IKU	Persentase	1,5%	1,4%	1,3%	1,2%	1%	Layanan Audit Internal	0,249	1,139	1,139	1,139	1,139	- Audit Kinerja - Audit Khusus - Reviu RKAKL
									Monitoring dan evaluasi kebijakan, Industri Cangkupan Tugas Inspektorat II	0,307	3,142	3,142	3,142	3,142	-Monitoring dan evaluasi SAKIP satuan Kerja cangkupan tugas Inspektorat II Monitoring dan evaluasi kebijakan Industri dan tata Kelola
															kepemerintahan sesuai kebijakan pengawasan

								Consulting Keg. Beresiko Tinggi cangkupan Inspektor II	0,271	0,783	0,783	0,783	0,783	Konsultasi Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Beresiko Tinggi Pengawasan pada satker cangkupan tugas Inspektorat II
								Reviu laporan Keuangan dan BMN Unit Kerja Cangkupan Inspektora t II	0.133	0.318	0.318	0.318	0.318	Reviu Laporan Keuangan dan BMN satuan Kerja cangkupan Inspektorat II, Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan

2	Maksimum Rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan Tugas Inspektorat II	Persentase	10%	8%	-	-	-	Layanan Audit Internal	Sama dengan SK1.1					-Audit Kinerja -Audit Khusus -Reviu RKAKL
3	Pengaduan Masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti pada cakupan tugas Inspektorat II	Persentase	80%	85%	90%	95%	100%	Layanan Audit Internal	0	0,114	0,114	0,114	0,114	Pengawasan sebagai tindak lanjut
4	Rekomendasi hasil Pengawasan	Persentase	91%	91,5%	92%	92,5%	93%	Layanan Audit Internal	0,012	0,521	0,521	0,521	0,521	Pemantauan tindak lanjut hasil

	Internal yang ditindaklanjuti oleh satker sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan pada cangkupan tugas Inspektorat II)*IKU														pengawasan
SK2	Terwujudnya tata Kelola Pemerintahan Unit Kerja cangkupan Tugas Inspektorat II yang baik														
1	Indeks Penerapan	Level	3	3	3	4	4	Consulting keg.	0	0.900	0.900	0.900	0,900	Konsultasi Penyusunan	

	Manajemen Resiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU							Beresiko tinggi cangkupan tugas inspektorat II						Peta Resiko Satuan Kerja Cangkupan tugas Inspektorat II
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL														
SK3	Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan Internal yang Efektif													
	1 Tingkat Kesesuaian pelaksanaan pengawasan di Inspektorat II dengan standar pelaksanaan Pengawasan	Persentase	75%	75%	80%	80%	85%	Manajemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Pengawasan	0,239	1,409	1,409	1,409	1,409	-Penyusunan Program kerja dan anggaran -Penyusunan dokumen evaluasi dan akuntabilitas

									Inspektorat II						
	2	Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	Presentase	76 %	77%	78%	79%	80%	Manajemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Pengawasan Inspektorat II						
SK4		Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri													
	1	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam negeri dalam Pengadaan Barang dan Jaa di Inspektorat II *)IKU	Persentase	Belum ada	75%	80%	85%	90%							pagu anggaran P3DN berdasarkan akun belanja barang yang ada di Inspektorat II yaitu 521811, 521219, ,521211, 522192, 524119

PERSEPEKTIF KELEMBAGAAN														
SK5	Terwujudnya system manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien													
1	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	Persentase	70%	80%	90%	100%	100%	Manajemen kinerja pengawasan dan pelaporan kinerja pengawasan Inspektorat II	Sd SK 3.1	- Penyusunan Program Kerja Anggaran - Penyusunan dokumen evaluasi	Manajemen kinerja pengawasan dan pelaporan kinerja pengawasan Inspektorat II	Sd SK 3.1	- Penyusunan Program Kerja Anggaran - Penyusunan	Manajemen kinerja pengawasan dan pelaporan kinerja pengawasan Inspektorat II

										asi dan akuntabilitas			dokumen evaluasi dan akuntabilitas	
										Koordinasi peran pengawasan lainnya cakupan tugas Inspektorat II			Koordinasi peran pengawasan lainnya cakupan tugas Inspektorat II	
2	Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan	Persentase	80%	90%	100%	100%	100%	Manajemen kinerja pengawasan dan pelaporan			Manajemen kinerja pengaw			Manajemen kinerja pengawasan dan pelaporan kinerja pengawasan

	perannya							kinerja pengawasan Inspektorat II			asan dan pelaporan kinerja pengawasan Inspektorat II			Inspektorat II
--	----------	--	--	--	--	--	--	---	--	--	---	--	--	----------------

Tabel 9. REALISASI SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS

INSPEKTORAT II TAHUN 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan	Target					Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat II Stakeholders Perspective												
SK1	Terwujudnya Keefektifan dan Keefisienan Program Kerja Unit Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I											
	1 Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada cakupan tugas Inspektorat II	Persen	1.5%	1.4%	1.3%	1.2%	1%	0.035%	0.033%	0%		
	2 Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai Cakupan Tugas Inspektorat II	Persen	10%	8%	-	-	-	0%	0%	-		
	3 Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan	Persen	80%	85%	90%	95%	100%	100%	100%	100%		

		ditindaklanjuti pada cakupan tugas Inspektorat II											
	4	Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan pada cakupan tugas Inspektorat II	Persen	91%	91.5%	92%	92.5%	93%	48.15%	72.3%	76.47%		
SK2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Unit Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II Yang Baik												
	1	Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Cakupan Tugas Inspektorat II	Level	3	3	3	4	4	Ditjen IKMA 3,8 dan Ditjen ILMATE 3,640	2.62	2		
Internal Process Perspective													
SK3	Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan Internal Yang Efektif												
	1	Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat II	Persen	75%	75%	80%	80%	85%	97.20%	87.5%	91.85%		

	2	Penerepan Teknik Audit berbasis komputer								86%	89.14%		
SK4		Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri											
	1	Presentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa *)IKU	Persen	-	-	80%	85%	90%	-	99.05%	98.65%		
Learn And Growth Perspective													
SK5		Terwujudnya Sistem Pengawasan Internal yang Efektif, dan Efisien											
	1	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	Persen	70%	80%	90%	100%	100%	78.26%	85,29	95.24%		
	2	Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya									100%		

Capaian Kinerja Inspektorat II yang dibandingkan dengan target nasional yang tertuang dalam RPJMN 2020 - 2024 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 Tentang Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

No	Sasaran	Indikator	Baseline 2018	Target 2024
6. Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sakip ≥ B:				
		1. Kementerian/Lembaga (%)	92,77 (2018)	100
		2. Provinsi (%)	94,12 (2018)	100
		3. Kabupaten/Kota (%)	46,85 (2018)	80
5	Menyaga Stabilitas Keamanan Nasional	1. Global Fire Power Index	0,26	0,20
		2. Global Terrorism Index	5,07	4,24
		3. Proporsi orang yang merasa aman berjalan Sendirian (%)	58,32 (2017)	>60
		4. Indeks Keamanan dan Ketertiban Nasional	N/A*	3,4
		5. Indeks Risiko Terorisme (Pelaku)	38,24 (2018)	37,60
		6. Indeks Risiko Terorisme (target)	54,46 (2018)	54,00
		7. Angka Pelanggaran Lintas Batas Negara	382	<150
		8. Angka Kejadian Konflik	60	35
		9. Angka Korban Pengungsi Internal	16.000 (2018)	14.000
		10. Terpernahnya Minimum Essential Force (MEF) (%)	68,9	100
		11. Kontribusi Industri Pertahanan terhadap Pemenuhan Alutsista (%)	41,9	≥50
		12. Angka Pelanggaran Hukam dan Gangguan Keamanan di Laut	300	202
		13. Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika (%)	1,8	1,69
		14. Tingkat Kriminalitas (Orang/100.000 Penduduk)	118 (2018)	111
		15. Pelayanan Publik Polri yang Prima (%)	61	65
				16. Skor Global Cyber Security Index

(*pembaruan metode perhitungan pada tahun 2020-2024)

Grafik 7. RPJMN 2020 - 2024

Dimana capaian kinerja Inspektorat II Tahun 2022 sesuai dengan target yang tertuang di RPJMN 2020 – 2024 adalah :

Target dalam RPJMN untuk sasaran Persentase instansi Pemerintah (K/L; provinsi; kab/kota) yang akuntabel (Skor atas SAKIP kategori "B" keatas) (%) dengan

capaian nilai SAKIP untuk unit binaan Inspektorat II Tahun 2022 yaitu, Direktorat Jenderal ILMATE mendapat nilai 75.45 (BB) dan Direktorat Jenderal IKMA mendapat nilai 77.85 (BB);

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Realisasi keuangan kegiatan Layanan Perencanaan dan Penganggaran, Layanan Pemantauan dan Evaluasi, dan Layanan Audit Internal Inspektorat II Pada Triwulan IV tahun 2022 (Oktober - Desember) realisasi anggaran sesuai Aplikasi PP39 mencapai Rp493.377.500,- atau sebesar 25.63% dari pagu anggaran sebesar Rp1.925.000.000,- dengan realisasi capaian Fisik sebesar 8.55%.

Adapun realisasi keuangan sampai dengan Triwulan IV tahun anggaran 2022 (Januari - Desember) sesuai Aplikasi PP39 mencapai Rp1.897.665.000,- Atau sebesar 98.58% dari total anggaran Rp1.925.000.000,- dengan realisasi capaian fisik sebesar 99.64%. Berdasarkan Aplikasi Sakti sampai dengan bulan Desember Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp Rp1.898.541.285,- atau 98.63% (anggaran yg digunakan setelah dikurangi Blokir) dan Sisa Anggaran setelah dikurangi blokir Sebesar Rp26.458.715,-

Terdapat perbedaan realisasi anggaran pada Aplikasi PP39 dibandingkan dengan realisasi Aplikasi SAKTI dikarenakan ada SPTJB yang belum diinput Nomor atau Tanggal SP2D nya.

Tabel 10. Capaian Realisasi Keuangan Inspektorat II Tahun 2022

KODE	OUTPUT / RINCIAN AKUN	PAGU AWAL	PAGU REVISI	REALISASI		SISA	REAL. FISIK
				TOTAL	%		
1842	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat II	2.050.000.000	1.925.000.000	1.898.541.285	98,63	26.458.715	99,64%
1842.EBD .952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	25.110.000	24.912.000	24.810.008	99,59	101.992	100%
051	Penyusunan Program Kerja dan Anggaran	25.110.000	24.912.000	24.810.008	99,59	101.992	100%
A	Pengelolaan Arsip dan Ketatausahaan Inspektorat II	15.866.000	11.916.000	11.884.700	99,74	31.300	100%
B	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Inspektorat II	4.622.000	6.374.000	6.344.500	99,54	29.500	100%
C	Koordinasi Penyusunan Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat II	4.622.000	6.622.000	6.580.808	99,38	41.192	100%
1842.EBD .953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	24.890.000	25.088.000	24.996.000	99,63	92.000	100%
051	Penyusunan Dokumen Evaluasi	24.890.000	25.088.000	24.996.000	99,63	92.000	100%

	dan Akuntabilitas Inspektorat II						
A	Penyusunan Laporan PP39 (Triwulanan)	9.244.000	6.100.000	6.084.000	99.74	16.000	100%
B	Penyusunan LAKIP Inspektorat II	7.402.000	6.100.000	7.692.000	99.33	52.000	100%
C	Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Inspektorat II	8.244.000	11.244.000	11.220.000	99.79	24.000	100%
1842.TBD.965	Layanan Audit Internal	2.000.000.000	1.875.000.000	1.848.735.277	98.60	26.264.723	98,75%
051	Audit Program dan Kegiatan Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat II	1.039.990.000	791.699.000	790.406.521	99.84	1.292.479	100%
A	Audit Kinerja pada Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	125.915.000	122.855.000	122.758.912	99.92	96.088	100%
B	Audit Kinerja pada Program Pengembangan dan Penumbuhan Industri Kecil, Menengah dan Aneka dan BPIPI Sidoarjo	174.055.000	139.140.000	138.576.204	99.59	563.796	95%
C	Audit Pengelolaan Dana Dekonsentrasi PIKM Pada Dinas Perindustrian Provinsi	658.559.000	529.704.000	529.071.405	99.88	632.595	100%
D	Audit Dengan Tujuan Tertentu Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat II	81.461.000	-	-		-	-

052	Reviu Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat II	124.342.000	85.505.000	84.540.885	98.53	1.264.115	100%
A	Reviu Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara	80.355.000	50.592.000	49.623.892.	98.09	9681.08	100%
B	Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan	30.743.000	22.472.000	22.283.393	99.16	188.507	100%
C	Reviu Rencana Kerja Anggaran	6.622.000	6.627.000	6.586.100	99.38	40.900	100%
D	Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara	6.622.000	6.114.000	6.047.500	98.91	66.500	100%
053	Monitoring dan Evaluasi SAKIP Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II	4.622.000	104.622.000	100.218.619	95.79	4.403.381	100%
A	Evaluasi dan Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	4.622.000	4.622.000	4.509.900	97.57	112.100	100%
B	Pengawasan Produk dalam Negeri		100.000.000	95.708.719	95.71	4.291.281	100%
054	Konsulting dan Pengawasan Pada Satker Cakupan Tugas Inspektorat II	831.046.000	892.874.000	873.569.252	97.84	19.304.748	100%
A	Pengawasan Kegiatan Prioritas Kementerian dan Nasional	283.762.000	428.679.000	413.379.534	96.43	15.299.466	100%
B	Pengawasan Program dan Kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional Ditjen ILMATE dan Ditjen IKMA	252.802.000	155.626.000	155.468.005	99.90	157.995	100%
C	Konsultasi dan Pembinaan Dalam Rangka Peningkatan Peran Pengawasan Inspektorat II	294.482.000	308.569.000	304.721.713	98.75	3847.287	100%

Tabel 11. Perbandingan Realisasi Keuangan PP 39 dengan Aplikasi Sakti TA 2022

KODE	OUTPUT / RINCIAN AKUN	PAGU	Pagu Revisi	Realisasi Aplikasi SAKTI		Realisasi PP 39	
				TOTAL	%	TOTAL	%
1842	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat II	2.050.000.000	1.925.000.000	1.898.541.285	98.63	1.897.665.000	98.58
1842.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	25.110.000	24.912.000	24.810.008	99,59	24.810.000	99.59
1842.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	24.890.000	25.088.000	24.996.000	99.63	24.996.000	99.63
1842.TBD.965	Layanan Audit Internal	2.000.000.000	1.875.000.000	1.848.735.277	98.60	1.847.858.942	98.55
	TOTAL	2.050.000.000	1.925.000.000	1.898.541.285	98.63	1.897.665.000	98.58

Tabel 12. Alokasi Dan Realisasi Anggaran Untuk Pencapaian Sasaran Kinerja Dengan Indikator Yang Telah Ditetapkan TA. 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kegiatan	Anggaran (Pagu Revisi)	Realisasi	%
Perspektif Pemangku Kepentingan								
1.	Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	1. Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal pada cakupan tugas Inspektorat II *) IKU	1,3%	0%	-Audit Kinerja cakupan tugas Inspektorat II -Reviu pada cakupan tugas Inspektorat II -Monev SAKIP -Konsulting dan Pengawasan	1.875.000.000	1.848.735.277	98.60

		2. Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti pada cakupan tugas Inspektorat II	90%	100%	-Tindak lanjut pengaduan masyarakat berkadar pengawasan	-	-	-
		3. Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat II *) IKU	92%	76.47%	-Audit Kinerja cakupan tugas Inspektorat II	791.699.000	790.406.521	99.84
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik	4. Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU	Level 3	Level 2	-Penyusunan Peta Risiko	-	-	-
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL								
3.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	1. Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat II	80%	91.85%	-Penyusunan Dokumen Akuntabilitas	25.088.000	24.996.000	99.63
		2. Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	78%	89.14%	-Audit Kinerja cakupan tugas Inspektorat II	791.699.000	790.406.521	99.84
4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri barang dan jasa Dalam Negeri	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal *)IKU	80%	96.38%	-Total pagu anggaran P3DN berdasarkan akun belanja barang Inspektorat 2	159.712.000	153.935.608	96.38

PERSPEKTIF KELEMBAGAAN								
4.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1. Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	90%	95.24%	-Penyusunan program kerja dan anggaran -Penyusunan dokumen evaluasi dan akuntabilitas	50.000.000	49.806.008	99.61
		2. Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	100%	100%	-	-	-	-

Pencapaian realisasi keuangan setiap triwulan selama tahun 2020-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 13. Realisasi Keuangan per Triwulan 2022 berdasarkan Data Aplikasi PP39

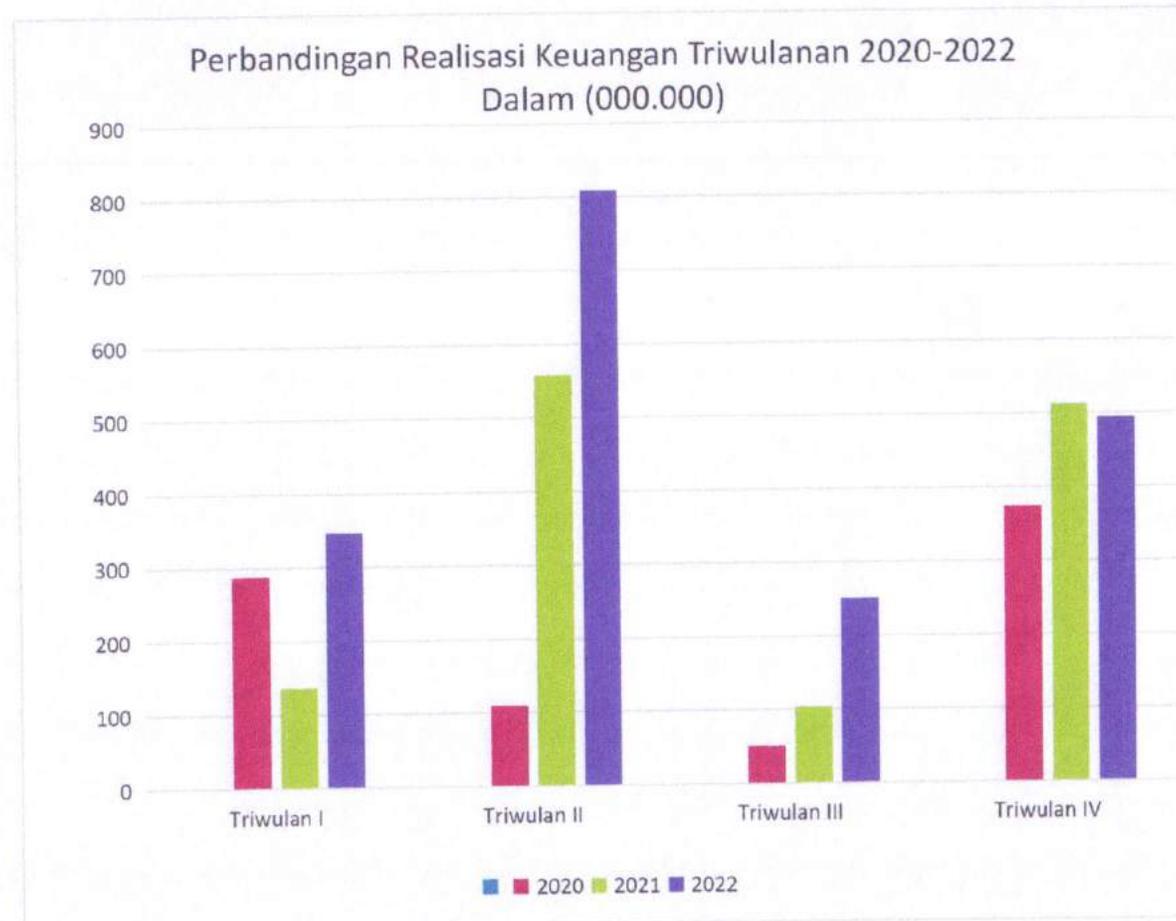
No	Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi					% Realisasi
			TW I	TW II	TW III	TW IV	Total	
1	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Satuan Kerja Inspektorat II	24.912.000	4.228.300	7.705.700	2.889.792	4.185.216	24.809.861	99.59
2	Layanan Pemantauan dan EvaluasiEvaluasi Kegiatan Inspektorat II	25.088.000	6.268.000	3.199.000	2.882.611.20	4.244.889.60	24.995.174	99.63
3	Audit Program Prioritas dan Program Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II	791.699.000	120.409.912	493.831.905	50.075.871.80	89.949.302.70	790.432.282	99.84
4	Reviu Laporan Keuangan/BMN dan Penganggaran Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II	85.805.000	37.685.333	10.456.200	730.923.60	995.338	84.543.667	98.53
5	Monitoring dan Evaluasi Tata Kelola dan Kebijakan Industri Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II	104.622.000	1.121.034	3.384.500	1.386.600	95.708.719	100.217.414	95.79
6	Consulting dan Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II	892.874.000	176.154.711	290.500.405	56.011.723.60	108.037.754	873.587.922	97.84
	TOTAL	1.925.000.000	345.867.290	809.077.710	250.305.000	493.377.500	1.898.627.500	98.63

Tabel 14. Realisasi Keuangan per Triwulan 2021 berdasarkan Data Aplikasi PP39

No	Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi					% Realisasi
			TW I	TW II	TW III	TW IV	Total	
1	Audit Program Prioritas dan Program Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II	846.886.000	58.973.760	397.425.811	220.445.172	153.973.260	843,919,603	99.65
2	Reviu Laporan Keuangan/BMN dan Penganggaran Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II	69.174.000	54.749.642	-	2.389.750	11.575.500	68,714,892	99.34
3	Monitoring dan Evaluasi Tata Kelola dan Kebijakan Industri Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II	6.726.000	3.297.600	1.587.000	-	1.808.000	6,692,600	99.50
4	Consulting dan Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II	388.660.000	10.821.108	89.743.506	10.195.900	277.607.317	388,368,431	99.92
5	Anggaran Satuan Kerja Inspektorat II	182.712.000	6.538.800	67.351.400	44.191.600	62.316.905	180,778,705	98.94
6	Evaluasi Kegiatan Inspektorat II	10.842.000	2.460.200	2.162.350	1.560.200	4.633.400	10,816,150	99.76
	TOTAL	1.505.000.000	136.864.000	558.270.067	103.961.000	511.914.382	1,499,290,381	99.62

Tabel 15. Realisasi Keuangan per Triwulan 2020 berdasarkan Data Aplikasi PP39

No	Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi				Total	% Realisasi
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	Menejemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Pengawasan Inspektorat II	176.218.000	67.111.311	22.943.512	10.067.917	46.437.771	146.560.511	83.17
2	Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unit Kerja Cakupan Inspektorat II	71.745.000	67.721.826	-	-	2.401.737	70.123.563	97.74
3	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas Inspektorat II	258.115.000	-	981.661	2.398.338	230.962.610	234.342.609	90.79
4	Consulting Kegiatan Berisiko Tinggi Cakupan Tugas Inspektorat II	209.439.000	58.562.066	14.686.182	34.838.401	82.984.551	191.071.200	91.23
5	Layanan Audit Internal	242.875.000	94.662.122	71.657.690	3.464.029	10.988.022	180.771.863	74.43
	TOTAL	958.392.000	288.057.325	110.269.045	50.768.685	373.774.691	822.869.746	85.86



Grafik 8. realisasi keuangan triwulanan tahun 2020-2022

Tabel 16. Perbandingan Realisasi Keuangan Tahun 2022 dan 2021

No	Program/Kegiatan	Pagu			Realisasi Total		
		2021	2022	Perbedaan	2021	2022	Perbedaan
1	Anggaran Satuan Kerja Inspektorat II	182.712.000	24.912.000	157.800.000	180.778.705	24.809.861	155.968.844
2	Evaluasi Kegiatan Inspektorat II	10.842.000	25.088.000	(14.246.000)	10.816.150	24.995.174	(14.179.024)
3	Audit Program Prioritas dan Program Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II	846.886.000	791.699.000	55.187.000	843.919.603	790.432.282	53.487.321
4	Reviu Laporan Keuangan/BMN dan Penganggaran Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II	69.174.000	85.805.000	(16.631.000)	68.714.892	84.543.667	(15.828.775)
5	Monitoring dan Evaluasi Tata Kelola dan Kebijakan Industri Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II	6.726.000	104.622.000	(98.622.000)	6.692.600	100.217.414	(93.524.814)
6	Consulting dan Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II	388.660.000	892.874.000	(504.214.000)	388.368.431	873.587.922	(485.219.491)
	Total	1.505.000.000	1.925.000.000	(420.000.000)	1.499.290.381	1.898.627.500	(399.337.119)



Grafik 9. Realisasi keuangan perkegiatan tahun 2020-2022

Berdasarkan perhitungan *Aplikasi Sakti*, pada realisasi keuangan tahun 2022 terdapat kenaikan/Penurunan anggaran sebagai berikut :

1. Anggaran Satuan Kerja Inspektorat II.
Pada program/kegiatan ini terjadi penurunan pagu anggaran dari tahun sebelumnya (TA 2021) yaitu sekitar 86.28% (Rp155.968.844,-).
2. Evaluasi Kegiatan Inspektorat II
Pada Program/kegiatan ini terjadi Peningkatan Pagu anggaran dari tahun sebelumnya (TA 2021) yaitu sekitar 131.40%, senilai Rp 14.246.000,-
3. Audit Program Prioritas dan Program Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II
Pada program/kegiatan ini terjadi penurunan pagu anggaran dari tahun sebelumnya (TA 2021) yaitu sekitar 6.52%, senilai Rp 55.187.000,-
4. Reviu Laporan Keuangan/BMN dan Penganggaran Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II
Pada program/kegiatan ini terjadi Kenaikan pagu anggaran dari tahun sebelumnya (TA 2021) yaitu sekitar 23.61%, senilai Rp 16.331.000,-
5. Monitoring dan Evaluasi Tata Kelola dan Kebijakan Industri Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II
Pada program/kegiatan ini terjadi kenaikan pagu anggaran dari tahun sebelumnya (TA 2021) yaitu sekitar 1455.49%%, senilai Rp 97.896.000,-
6. Consulting dan Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II
Pada program/kegiatan ini terjadi kenaikan pagu anggaran dari tahun sebelumnya (TA 2021) yaitu sekitar 129.73%, senilai 504.214.000,-

Pada tahun anggaran 2022 terdapat perbedaan antara aplikasi PP39 dan aplikasi SAKTI, Pada Aplikasi PP39 Realisasi sebesar Rp1.897.665.000,-(98.58%), sedangkan pada aplikasi SAKTI nilai realisasi sebesar Rp1.898.541.285,- (98.63%), terdapat penurunan realisasi antara tahun 2021 dan 2022 yaitu sebesar 0.99%, hal; ini terjadi karena kergiatan pengawasan yang kurang optimal dan akan ditingkatkan dalam tahun 2023.

C. ANALISA ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia pada Inspektorat II sampai akhir tahun 2022 sebanyak 21 (dua puluh satu) orang yang terdiri atas 18 (delapan belas) orang PNS, 1 (satu) orang CPNS dan 2 (dua) orang PPNPN. Dari 18 (delapan belas) orang PNS, 2 (dua) orang diantaranya sedang Tugas Belajar, dengan rincian sebagai berikut:

1. Inspektur II : Ir. R. Janu Suryanto, ME
2. Kasubag Tata Usaha : Risniarti, SST., MM
3. Pengendali Teknis :
 - a) Asmeida, S.Sos, M.Ak
 - b) Dyan Garneta Paramita Sari, S.T.P., M.Sc
4. Auditor Inspektorat II :

No	Nama Auditor	Jabatan
1	Giry Rachman, S.Kom	Auditor Muda
2	Denny Chandra Arifin, S.Kom. MM	Auditor Muda
3	Rizki Aviandri, S.T., M.T., M.B.A	Auditor Muda
4	Dwi Harjanto, ST	Auditor Muda
5	Agung Tri Utomo, SE	Auditor Muda
6	Zita Tessa Rahayani, SE, MPA	Auditor Muda
7	Suwarda, SE	Auditor Pertama

8	Atik Rindarsih, S.E	Auditor Pertama
9	Yansen Aditya Sembiring, SH	Auditor Pertama
10	Azka Rianto Tedja Ningrat, ST	Auditor Pertama (Tugas Belajar Semester II 2022)
11	Elizabeth Frycillya Aritonang, S.T.	Auditor Pertama
12	Indra Irwan, S.AP	Auditor Pertama
13	Gian Adhi Darmawan	Calon Auditor Pertama
14	Dian Novita Sari, S.T	Auditor Pertama (Tugas Belajar)

5. Staff Tata Usaha:

- a) Andy Sebastian Tanasha S.Kom
- b) Ananda Irawadi A.md (PPNPN)

6. Staff Umum: Muhammadin (PPNPN)

Secara garis besar mayoritas pegawai Inspektorat II bergelar S1 dan beberapa telah menempuh pendidikan S2, terdapat upaya peningkatan Sumber Daya Manusia Inspektorat II hal ini dapat dilihat dari 2 pegawai yang saat ini sedang melakukan tugas belajar yang diharapkan kelak dapat meningkatkan kinerja Inspektorat II sehingga lebih Profesional dan dapat diandalkan. Dengan jumlah SDM yang tersedia, Inspektorat II dapat memaksimalkan capaian kinerja dengan realisasi capaian fisik sebesar 99,64%.

Angka ini berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia pada Inspektorat II 2022 sebanyak 21 (dua puluh satu) orang yang terdiri atas 18 (delapan belas) orang PNS dan 3 (tiga) orang PPNPN.

Dari 18 (delapan belas) orang PNS, 1 (satu) orang diantaranya sedang Tugas Belajar. Dengan jumlah SDM yang tersedia, Inspektorat II dapat memaksimalkan capaian kinerja dengan realisasi capaian fisik sebesar 100%.

Berdasarkan data tersebut, maka telah ada efisiensi sumber daya manusia dan anggaran dalam pencapaian kinerja Inspektorat II. Terlihat bahwa alokasi SDM dan anggaran yang disediakan dalam pelaksanaan kegiatan di Inspektorat II secara simultan dapat mendukung capaian sasaran yang ditetapkan pada perjanjian kinerja.

Secara umum, dapat dikatakan bahwa dengan jumlah SDM tersebut Inspektorat II dapat memaksimalkan capaian kinerja mencapai lebih dari 99% sehingga masih dalam kategori sangat baik dalam koordinasi dan pelaksanaan tugas dan fungsi meskipun masih belum ideal dan optimal.

BAB IV PENUTUP

TINJAUAN UMUM KEBERHASILAN DAN PERMASALAHAN/KENDALA

A. KEBERHASILAN

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Inspektorat II tahun 2022, secara umum dapat dikemukakan :

1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat II tahun 2022 telah berjalan baik, tercermin dari terealisasinya Kegiatan Inspektorat II dan hasil-hasil yang dicapai.
2. Capaian Kinerja Kegiatan Inspektorat II dalam tahun 2022 telah berjalan dengan baik sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2022.

B. PERMASALAHAN/KENDALA

Permasalahan/kendala yang dihadapi atas pelaksanaan kegiatan Inspektorat II tahun 2022 yaitu Pelaksanaan kegiatan Inspektorat II pada Tahun Anggaran 2022 terdapat beberapa kendala masih adanya pandemi COVID 19, anggaran Inspektorat II TA 2022 sebesar Rp.2.050.000.000,- dan adanya penghematan anggaran Inspektorat II sebesar Rp.125.000.000- sehingga Pagu Inspektorat II Tahun Anggaran 2022 menjadi sebesar Rp. 1.925.000.000,- selain itu masih berlangsung pola kerja dari work from office (WFO) ke work from home (WFH) sehingga Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) perlu di revisi, untuk realisasi anggaran pada tahun 2022 sudah optimal walaupun beberapa kali revisi anggaran untuk menyesuaikan dengan aplikasi SAKTI yang *rigid* dan adanya penyesuaian jadwal karena ada kegiatan pada Sekretariat Inspektorat Jenderal.

C. UPAYA DAN STRATEGI PEMECAHAN

Untuk mengatasi permasalahan dan kendala tersebut, langkah-langkah dan strategi pemecahan yang dilakukan adalah :

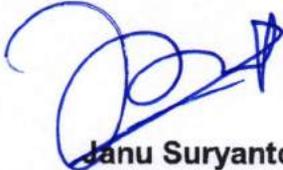
1. Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Itjen dan melakukan penyesuaian PKPT terhadap jadwal pengawasan yang dilakukan untuk tahun anggaran 2022.

2. Melakukan perubahan/revisi terhadap anggaran yang tidak dapat terlaksana sehingga fungsi pengawasan menjadi lebih optimal.
3. Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Itjen terhadap permasalahan realisasi keuangan di tahun 2022 agar tidak terulang kembali.
4. Berkoordinasi dengan Bagian Keuangan untuk segera mengatasi hambatan penginputan SPTJB pada tahun Anggaran 2022.
5. Berkoordinasi dengan Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan untuk segera mengatasi hambatan dan kendala pelaksanaan kegiatan pada tahun Anggaran 2022.
6. Berkoordinasi dengan bagian Program dan Anggaran untuk melakukan Revisi anggaran, menyesuaikan dengan aplikasi SAKTI.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat II Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian tahun anggaran 2022 ini disusun, yang menggambarkan tentang kinerja, permasalahan-permasalahan serta hasil evaluasi dan diharapkan bermanfaat sebagai bahan informasi bagi upaya-upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, serta bahan masukan untuk pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Perindustrian.

Jakarta, Februari 2023

Inspektur II



Janu Suryanto

LAMPIRAN

**RENCANA AKSI PENCAPAIAN PERJANJIAN KINERJA INSPEKTORAT II
TAHUN ANGGARAN 2022
Unit Organisasi : Inspektorat II**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Total	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			Penanggung Jawab	Pelaksana
				Rencana Kegiatan	Target Antara	Realisasi											
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN																	
1	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Program Kerja Unit Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II	1. Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada cakupan tugas Inspektorat II *) IKU	1.30%	- Audit Program dan Kegiatan Ditjen IKMA, ILMATE dan BPIPI - Audit Dana Dekonsentrasi - Audit dengan tujuan tertentu - Pengawasan dan konsulting Reviu - Monev Sakip	25%	25%	- Audit Program dan Kegiatan Ditjen IKMA, ILMATE dan BPIPI - Audit Dana Dekonsentrasi - Audit dengan tujuan tertentu - Pengawasan dan konsulting Reviu - Monev Sakip	25%	25%	- Audit Program dan Kegiatan Ditjen IKMA, ILMATE dan BPIPI - Audit Dana Dekonsentrasi - Audit dengan tujuan tertentu - Pengawasan dan konsulting Reviu - Monev Sakip	25%	25%	- Audit Program dan Kegiatan Ditjen IKMA, ILMATE dan BPIPI - Audit Dana Dekonsentrasi - Audit dengan tujuan tertentu - Pengawasan dan konsulting Reviu - Monev Sakip	25%	25%	Inspektor II	Seluruh Pegawai Inspektorat II
		3. Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti pada cakupan tugas Inspektorat II	90%	Pengawasan sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat	25%	25%	Pengawasan sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat	25%	25%	Pengawasan sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat	25%	25%	Pengawasan sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat	25%	25%	Inspektor II	Seluruh Pegawai Inspektorat II
		3. Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh s atker sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan pada cakupan tugas Inspektorat II	92%	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	25%	25%	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	25%	25%	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	25%	25%	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	25%	25%	Inspektor II	Seluruh Pegawai Inspektorat II
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Unit Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II yang baik	1. Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Cakupan Tugas Inspektorat II	Level 3	-	25%	25%	-	25%	25%	-	25%	25%	-	25%	25%	Inspektor II	Seluruh Pegawai Inspektorat II
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE																	
3	Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan Internal yang Efektif	1. Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat II	80%	Melakukan Survei Kepuasan Pelanggan cakupan Inspektorat II	25%	25%	Melakukan Survei Kepuasan Pelanggan cakupan Inspektorat II	25%	25%	Melakukan Survei Kepuasan Pelanggan cakupan Inspektorat II	25%	25%	Melakukan Survei Kepuasan Pelanggan cakupan Inspektorat II	25%	25%	Inspektor II	Seluruh Pegawai Inspektorat II
		2. Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	78%	Survey Audit pada Cakupan Tugas Inspektorat II	25%	25%	Survey Audit pada Cakupan Tugas Inspektorat II	25%	25%	Survey Audit pada Cakupan Tugas Inspektorat II	25%	25%	Survey Audit pada Cakupan Tugas Inspektorat II	25%	25%	Inspektor II	Seluruh Pegawai Inspektorat II
4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	Perentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat II	80%	Berdasarkan realisasi Belanja Produk dalam negeri berdasarkan akun yg telah disepakati	25%		Berdasarkan realisasi Belanja Produk dalam negeri berdasarkan akun yg telah disepakati	25%	25%	Berdasarkan realisasi Belanja Produk dalam negeri berdasarkan akun yg telah disepakati	25%	25%	Berdasarkan realisasi Belanja Produk dalam negeri berdasarkan akun yg telah disepakati	25%	25%	Inspektor II	Seluruh Pegawai Inspektorat II
LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE																	
5	Terwujudnya sistem Pengawasan internal yang efektif dan efisien	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	90%	Kesesuaian Surat Tugas dengan +/- 14 hari dari jadwal yang tertera di PKPT	30%	30%	Kesesuaian Surat Tugas dengan +/- 14 hari dari jadwal yang tertera di PKPT	30%	30%	Kesesuaian Surat Tugas dengan +/- 14 hari dari jadwal yang tertera di PKPT	20%	30%	Kesesuaian Surat Tugas dengan +/- 14 hari dari jadwal yang tertera di PKPT	20%	30%	Inspektor II	Seluruh Pegawai Inspektorat II
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	100%	Kesesuaian penugasan dan surat tugas dengan peran pengawasan	25%	25%	Kesesuaian penugasan dan surat tugas dengan peran pengawasan	25%	25%	Kesesuaian penugasan dan surat tugas dengan peran pengawasan	25%	25%	Kesesuaian penugasan dan surat tugas dengan peran pengawasan	25%	22%	Inspektor II	Seluruh Pegawai Inspektorat II

Jakarta, Februari 2023

Inspektor II


Jany Suryanto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
INSPEKTORAT II

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : R. Janu Suryanto

Jabatan : Inspektur II

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Masrokhan

Jabatan : Inspektur Jenderal

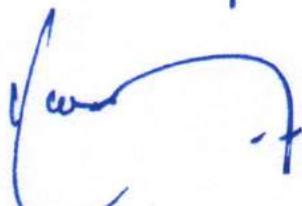
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2022

Inspektur Jenderal



Masrokhan

Inspektur II



Janu Suryanto

**PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT II TAHUN 2022**

TUJUAN

Kode SS	SASARAN TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
TJ	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien untuk Mendukung Peningkatan Peran Industri dalam Perekonomian Nasional	Indek Penerapan Manajemen Resiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU	3	Nilai

CUSTOMER PERSPECTIVE

Kode SS	SASARAN TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
SS.1	Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Batas Toleransi Temuan Material Pengawasan Eksternal pada Cakupan Tugas Inspektorat II *)IKU	1,3	Persen
		Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan yang Ditindaklanjuti pada Cakupan Tugas Inspektorat II	90	Persen
		Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang Ditindaklanjuti Satker Cakupan Tugas Inspektorat II *)IKU	92	Persen
SS.2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU	3	level

No	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Inspektorat II	Rp 25.110.000
2	Layanan Pemantauan dan Evaluasi Inspektorat II	Rp 24.890.000
3	Layanan Audit Internal Inspektorat II	Rp 2.000.000.000
	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat II (Dua Milyar Lima Puluh Juta Rupiah)	Rp 2.050.000.000

Jakarta, Januari 2022
Inspektur II


Janu Suryanto

BUSINESS INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

Kode SS	SASARAN TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
SS.3	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat II	80	Persen
		Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	78	Persen
SS.4	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat II*)IKU	80	Persen

LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE

Kode SS	SASARAN TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
SS.5	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	90	Persen
		Tingkat Kesesuaian Penugasan SDM Pengawasan sesuai dengan perannya	100	Persen

Jakarta, Januari 2022
Inspektur II



Janu Suryanto